disperakim
Provinsi Jawa Tengah

KAK

Kerangka ACUAN KERJA 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

https://disperakim.jatengprov.go.id/

KAK SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan ASN
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Kebutuhan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya Dana untuk kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka Pelaksanaan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang ditujukan untuk memenuhi Kebutuhan Gaji dan Tunjangan PNS dan PPPK di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pronvinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Tersedianya Dana dan Sisdur untuk Sub Kegiatan Penyediaan Dana Bagi Gaji dan Tunjangan **Hasil/Outcome** Peningkatan Kinerja PNS dan PPPK di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dampak/Impact
Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan terkait Gaji dan Tunjangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);
Swakelola

c). Kebutuhan Waktu;
12 (Dua Belas) bulan

d). Siapa yang terlibat;
PNS dan PPPK DISPERAKIM, Dinas terkait penyusunan Gaji dan Tunjangan ASN, Bank Jateng

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan Belanja Gaji dan Tunjangan – Kebutuhan Belanja Beras – Kebutuhan Belanja TPP
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi terkait Gaji dan Tunjangan, Beras dan TPP = 14 (empat belas) kali dalam satu tahun – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi Gaji dan Tunjangan, Beras dan TPP untuk memantau kenaikan dan perubahan yang ada – **Pihakyang terlibat dalam koordinasi :** a). PA, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Gaji dan Seluruh PNS dan PPPK DISPERAKIM – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** a). Tersedianya Gaji dan Tunjangan, Beras dan TPP Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara bulanan (satu tahun 14 kali)
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progress fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengampu. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** PNS dan PPPK DISPERAKIM

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024*	*: Rp 13.838.081.000,-*
		Th 2025	*: Rp 15.119.536.000,-*
		Th 2026	*: Rp 15.500.000.000,-*

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)

H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:	Diketahui Oleh:
Kepala Sub Bagian/ Seksi	Sekretaris / Kabid
ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.	**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**
NIP. 19770905 200212 1 004	NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												

KAK SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase Jumlah bulan terpenuhinya kebutuhan administrasi pendukung pelaksanaan tugas ASN
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Tersedianya honorarium PNS dan Upah Non PNS Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya dana Honorarium Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka menunjang Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam meningkatkan Pelayanann Perkantoran, diperlukan Honorarium, Upah dan Jasa Pelayanan Perkantoran di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Honorarium dan Upah Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN guna menunjang kegiatan Sumber Daya Aparatur PNS maupun Honorarium Non PNS di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Belum tersedianya honorarium pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **Hasil/Outcome** Tersedianya honorarium kegiatan pengelola keuangan, honorarium pejabat pengadaan dan honorarium tenaga pendukung serta belanja BPJS di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **Dampak/Impact** Terwujudnya kelancaran tugas, melaksanakan tugas dalam

		meningkatkan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);** - **c). Kebutuhan Waktu;** 12 (Dua Belas) bulan d). **Siapa yang terlibat;** ASN dan Non ASN
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja pegawai untuk Honorarium Pengelola Keuangan SKPD – Kebutuhan belanja pegawai untuk Honorarium Pegawai Non ASN (Tenaga Teknis Akuntansi S1 - 2 Orang) – Kebutuhan belanja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pegawai Non ASN
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi untuk Pengelola Keuangan SKPD = 12 (Dua Belas) Kali b). Koordinasi untuk Tenaga Teknis Akuntansi dan Perpajakan = 12 (Dua Belas) Kali – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi dalam Penyusunan Honararium kegiatan 2025; b). Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan SKPD untuk memantau progres pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Pengadaan serta mengidentifikasi dan menangani kemungkinan permasalahan yang muncul terkait Keuangan; c). Koordinasi Penyusunan Laporan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN untuk mengkompilasi dan mengolah data-data capaian realisasi kinerja Dinas Tahun 2025 dan mengevaluasi capaian tersebut. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** a). ASN DISPERAKIM dan NON ASN DISPERAKIM – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Koordinasi dan Pengendalian Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara bulanan
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengampu. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** ASN Disperakim dan NON ASN Disperakim
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024*	*: Rp 531.240.000,-*
		Th 2025	*: Rp 420.000.000,-*
		Th 2026	*: Rp 550.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:
Kepala Sub Bagian/ Seksi

ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.
NIP. 19770905 200212 1 004

Diketahui Oleh:
Sekretaris / Kabid

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut. M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan												
3	Sub-Sub Kegiatan Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan)												

KAK RENCANA SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase ketercapaian laporan pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya ASN yang berwawasan dalam pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka Pengujian/ Verifikasi Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan baik, lancar, berdaya guna dan berhasil guna
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebagai penunjang wawasan ASN dalam melaksanakan penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Diperlukan dana Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran **Hasil/Outcome** Peningkatan Sumber Daya Aparatur dan wawasan ASN di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dampak/Impact
Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);
Swakelola

c). Kebutuhan Waktu;
12 (Dua Belas) bulan

d). Siapa yang terlibat;
ASN Disperakim prov.jateng (Verifikator, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Pengelola Keuangan yang menggunakan Sistem Aplikasi terkait) dan Non ASN Disperakim Prov.Jateng

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Belanja Alat Tulis Kantor – Belanja Makanan dan Minuman Rapat – Kebutuhan Perjalanan Dinas Dalam Daerah
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi terkait Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan atau Asistensi Penatausahaan Keuangan / Verifikasi di Lapangan dalam 1 tahun b). Makan Minum Rapat Koordinasi Penatausahaan Keuangan 1x – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi pelaksanaan kegiatan penatausahaan dan verifikator keuangan untuk memantau kinerja dan kendala yang ada b). Koordinasi Evaluasi Hasil Pekerjaan – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** a). Penguji/ Verifikator, Pejabat Pembuat Komitmen, Pelaksana Kegiatan, ASN dan Non ASN Disperakim Prov.Jateng – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** a). Koordinasi untuk Pelaksanaan Kegiatan Penatausahaan dan Verifikator kegiatan tahun berjalan dilaksanakan dalam setahun
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progress fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. – **Pihak yang terlibat :** ASN dan Non ASN DISPERAKIM PROV JATENG

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: Rp 50.000.000,-* *: Rp 50.000.000,-* *: Rp 100.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:	Diketahui Oleh:
Kepala Sub Bagian/ Seksi	Sekretaris / Kabid
ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.	**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**
NIP. 19770905 200212 1 004	NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Bahan Habis Pakai (ATK)												
2	Sub-Sub Kegiatan Makan Minum Rapat												
3	Sub-Sub Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Daerah												

KAK SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase Jumlah dokumen laporan akuntansi perangkat Daerah
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya Dana untuk Penggandaan Laporan Akhir Tahun yang berisikan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebagai penunjang Pelaporan Keuangan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca dan Pelaporan Arus Kas yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Diperlukan dan tersedianya Sistem dan Prosedur serta dana Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran **Hasil/Outcome** Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pengguna Anggara, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pejabat Penata Pengusahaan Keuangan, Bendahara

Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen dan Pengadministrasian Keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dampak/Impact
Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan, Neraca dan Laporan Keuangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);
Swakelola

c). Kebutuhan Waktu;
12(Dua Belas) bulan

d). Siapa yang terlibat;
ASN DISPERAKIM dan Non ASN (Penyusun Laporan Keuangan)

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan Belanja Cetak dan Penggandaan (foto copy dan penjilidan laporan) – Kebutuhan Belanja Bahan Habis Pakai (ATK)
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi untuk Penyusunan Pelaporan Keuangan 1 Tahun (sebanyak 3-4 kali) – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi Persiapan Penyusunan Pelaporan Keuangan untuk memantau progres pelaksanaan penggandaan laporan keuangan di DISPERAKIM; mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan penggandaan – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** a). Pengelola Kegiatan (ASN DISPERAKIM dan Non ASN – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Koordinasi Persiapan Penyusunan Pelaporan Keuangan (Tahun N-1) dilaksanakan 2 Bulan, proses penggandaan 2 Minggu (satu tahun satu kali)
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengampu. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** ASN dan Non ASN DISPERAKIM, BPKAD Provinsi Jawa Tengah.

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: Rp 5.000.000,-* *: Rp 5.000.000,-* *: Rp 5.000.000,-,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh: Kepala Sub Bagian/ Seksi	Diketahui Oleh: Sekretaris / Kabid
ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.	**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**
NIP. 19770905 200212 1 004	NIP. 19731113 199803 1 00

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Bahan Habis Pakai (ATK)												
2	Sub-Sub Kegiatan Belanja Cetak dan Penggandaan												

KAK SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase ketercapaian Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya dana untuk kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD sebagai penunjang Pelaporan Keuangan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca dan Pelaporan Arus Kas yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Diperlukan dan tersedianya Sistem dan Prosedur serta dana Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran **Hasil/Outcome** Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Teknis

Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen dan Pengadministrasian Keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dampak/Impact
Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan, Neraca dan Laporan Keuangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);
-

c). Kebutuhan Waktu;
12 (Dua Belas) bulan

d). Siapa yang terlibat;
ASN dan Non ASN DISPERAKIM, ASN dari Dinas terkait yang menjadi Narasumber dan Moderator

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan Belanja Honorarium Narasumber dan Moderator – Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makan dan Minum Rapat – Belanja ATK – Belanja Perjalanan Dinas
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi untuk Persiapan Rapat Sosialisasi = 1 (satu) kali b). Koordinasi untuk Rapat Sosialisasi = 1 (satu) kali c). Koordinasi untuk Rapat Penyusunan Pelaporan Keuangan Tahun Berjalan = 2 (dua) kali – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi Persiapan Rapat Sosialisasi Kegiatan Tahun Berjalan untuk memantau progres pelaksanaan sebelum Rapat Sosialisasi; mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan yang mungkin muncul selama proses pelaksanaan kegiatan b). Koordinasi Rapat Sosialisasi untuk memantau progres pelaksanaan Pengelolaan keuangan serta mengidentifikasi dan menangani kemungkinan permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan anggaran di DISPERAKIM setiap bulannya c). Koordinasi Rapat Penyusunan Pelaporan Keuangan untuk menjembatani kendala/masalah yang dihadapi dalam penyusunan laporan keuangan di awal dan akhir tahun – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** a). Pengelola Keuangan, Kegiatan, ASN dan Non ASN Disperakim – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** a). Koordinasi untuk Persiapan Rapat Sosialisasi Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara 1 kali b). Koordinasi untuk Rapat Sosialisasi dilaksanakan 1 kali c). Koordinasi untuk Rapat Penyusunan Laporan Keuangan

		Tahun Berjalan dilaksanakan secara 2 kali
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** ASN Disperakim dan NON ASN Disperakim
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024 : Rp 25.700.000,-* *Th 2025 : Rp 25.000.000,-* *Th 2026 : Rp 39.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:	Diketahui Oleh:
Kepala Sub Bagian/ Seksi	Sekretaris / Kabid
ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.	**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**
NIP. 19770905 200212 1 004	NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Bahan Pakai Habis – ATK												
2	Sub-Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan												
3	Sub-Sub Kegiatan Jasa Narasumber dan Moderator												
4	Sub-Sub Kegiatan Makanan dan Minuman												
5	Sub-Sub Kegiatan Perjalanan Dinas												

KAK SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penyusunan Urusan Pemerintah Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase ketercapaian Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Sistem Aplikasi
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	Tersedianya dana untuk kegiatan dan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
2. Lokasi	:	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyediakan Dana untuk Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran sebagai penunjang Pelaporan Keuangan meliputi Realisasi Anggaran, Neraca dan Pelaporan Arus Kas yang ditujukan memenuhi Kebutuhan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Diperlukan dan tersedianya Sistem dan Prosedur serta dana Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran. Dalam Penyajian Laporan Realisasi Keuangan dalam rangka meningkatkan Akuntabilitas Laporan Keuangan Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Anggaran

Hasil/Outcome
Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembuat Dokumen dan Pengadministrasian Keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

Dampak/Impact
Penyampaian/ Penyediaan informasi tentang Pelaksanaan APBD Tahun berjalan, Neraca dan Laporan Keuangan, yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana Kegiatan Operasional dan Hasil yang direalisasikan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);
-

c). Kebutuhan Waktu;
12 (Dua Belas) Bulan

d). Siapa yang terlibat;
ASN dan Non ASN DISPERAKIM, ASN dari Dinas terkait yang menjadi Narasumber dan Moderator

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Belanja Cetak dan Penggandaan – Belanja Makan dan Minum Rapat – Belanja ATK
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** a). Koordinasi untuk Rapat Prognosis Semesteran = 2 (dua) kali – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** a). Koordinasi Rapat Semesteran untuk memantau progress pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran dan menangani kemungkinan permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan anggaran di DISPERAKIM setiap Semester – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** a). Pengelola Keuangan, Kegiatan, ASN dan Non ASN Disperakim – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** a). Koordinasi untuk Rapat Prognosis Semesteran dilaksanakan 2 kali
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pelaksana Kegiatan. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** ASN Disperakim dan NON ASN Disperakim

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-

2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: Rp 10.000.000,-* *: Rp 5.000.000,-* *: Rp 6.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran ASN Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan	

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:	Diketahui Oleh:
Kepala Sub Bagian/ Seksi	Sekretaris / Kabid
ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM.	**NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si**
NIP. 19770905 200212 1 004	NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Bahan Pakai Habis – ATK												
2	Sub-Sub Kegiatan Cetak dan Penggandaan												
3	Sub-Sub Kegiatan Makanan dan Minuman												

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Sekretariat/ Sub Bagian Program
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	9 (Sembilan) Dokumen yang terdiri dari : 1). 1 (Satu) Dokumen Laporan Sosialisasi Rumpun Infrastruktur TA 2025; 2). 1 (Satu) Dokumen Renja Tahun 2026 dan Renja Perubahan Tahun 2025; 3). 1 (Satu) Dokumen PK Tahun 2025 dan PK Perubahan Tahun 2025; 4). 1 (Satu) Dokumen RKT Tahun 2026; 5). 1 (Satu) Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA. 2025; 6). 1 (Satu) Dokumen RKAP TA. 2025 dan DPPA TA 2025; 7). 1 (Satu) Dokumen RKA TA. 2026 dan DPA TA 2026; 8). 1 (Satu) Dokumen Rencana Angaran dan Kinerja Tahun 2025 9). 1 (Satu) Dokumen Rencana Angaran dan Kinerja Perubahan Tahun 2025
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam pelaksanaan kegiatannya, Perangkat Daerah berlandaskan pada dokumen perencanaan yang mencakup penanganan isu strategis masing-masing OPD yang dituangkan dalam target capaian indikator kinerja setiap tahunnya. Dalam penyusunannya, dokumen perencanaan harus mempertimbangkan dan mengakomodasi regulasi terkait serta arah/kebijakan dari Pusat, Gubernur, dokumen perencanaan di atasnya, dsb. Kegiatan yang telah direncanakan kemudian disusun rencana penganggarannya, menyesuaikan dengan arah/kebijakan yang berlaku, kemampuan APBD, serta ketersedian sumber daya pendukung pada masing-masing OPD

	untuk kemudian dilaksanakan sebaik-baiknya. Beragamnya dokumen perencanaan program/kegiatan serta penganggaran memungkinkan terjadinya ketidaksinkronan dan ketidaksinergisan antar-dokumen. Hal ini dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat OPD. Selain itu, dampak lebih luasnya adalah terhambatnya pencapaian target indikator kinerja OPD yang tentu saja juga mempengaruhi pencapaian target kinerja provinsi. Oleh karena itu diperlukan suatu kegiatan yang dapat mewadahi proses penyusunan dokumen perencanaan tersebut. Menindaklanjuti hal tersebut, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran program maupun kegiatan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah diakomodasi dalam Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Dengan adanya Sub Kegiatan ini diharapkan dokumen perencanaan yang dihasilkan dapat lebih sinkron, sinergis dan berkualitas.
E. Lingkup kegiatan	: **a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Menyusun dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang berkualitas. **Permasalahan** Ketidaksinkronan dan ketidaksinergisan dokumen perencanaan yang dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan dan evaluasi kegiatan di tingkat OPD, yang lebih luasnya dapat menghambat pencapaian target indikator kinerja OPD yang tentu saja juga mempengaruhi pencapaian target kinerja provinsi. **Hasil/Outcome** Tersusunnya dokumen perencanaan program/ kegiatan dan penganggaran sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. **Dampak/Impact** Adanya sinergitas dan sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan sehingga target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal. **b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);** **Swakelola :** untuk pelaksanaan kegiatan rutin seperti penyediaan makan minum, rapat dan penyusunan dokumen maupun laporan **Konraktual :** ✓ Jasa Konsultansi: Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ✓ Jasa Konsultansi: Strategis Penataan Kawasan Permukiman **c). Kebutuhan Waktu;** 12 (Dua Belas) bulan **d). Siapa yang terlibat;** OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, Akademisi, LSM dan Masyarakat

F. Komponen kegiatan	:	
• Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan		
– Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja pegawai untuk tenaga pendukung teknis kegiatan (S1) sebanyak 2 (Dua) orang selama 12 (dua belas) bulan
– Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Narasumber yang terdiri dari Kepala OPD terkait urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, dan yang termasuk dalam TAPD. – Narasumber yang merupakan ahli dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pertanahan.
– Koordinasi	:	– Koordinasi secara intensif akan dilaksanakan dengan lingkup internal Disperakim Provinsi Jawa Tengah serta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah). – Koordinasi juga akan dilaksanakan melalui forum yang menjaring pendapat serta masukan dari berbagai pihak di luar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan profesional/ahli dalam urusan perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan yang terdiri dari akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, selain itu, koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat.
– Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan akan dilakukan dalam rangka koordinasi penyusunan dokumen perencanaan, serta dalam rangka menjaring usulan dan masukan yang dilaksanakan melalui berbagai forum seperti Sosialisasi Rumpun Infrastruktur, Musrenbangwil, Rakortek, dsb.; – Pihak yang terlibat yakni OPD terkait di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat.
• Kebutuhan Belanja Modal		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *: Rp.* 642.957.000,- *Th 2025* *: Rp. 657.600.000,-* *Th 2026* *: Rp. 581.723.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 2 Januari 2025

SEKRETARIS

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi
Pembina Tk. I
NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi rumpun infrastruktur tahun 2025												
2	Penyusunan dokumen rencana kerja (renja) OPD tahun 2026												
3	Penyusunan RKAP TA 2025												
4	Penyusunan DPPA TA 2025												
5	Penyusunan RKA TA 2026												
6	Penyusunan DPA TA 2026												
7	Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) TA 2025												
8	Penyusunan dokumen RKT TA 2025												
9	Penyusunan dokumen PK TA 2025 (PK Eselon 2,3, dan 4)												

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Subag	:	Sekretariat/ Sub Bagian Program
Program	:	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
Kegiatan	:	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase tingkat ketercapaian kinerja perangkat daerah
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Persentase dokumen perencanaan, dan evaluasi perangkat daerah yang disusun sesuai peraturan perundangan
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	11 (Sebelas) laporan evaluasi kinerja perangkat daerah yang terdiri dari : 1). 1 (Satu) Laporan Monev dan Pengendalian Kegiatan Tahun 2025; 2). 1 (Satu) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024; 3). 1 (Satu) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024; 4). 1 (Satu) Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) tahun 2024; 5). 4 (Empat) Laporan Hasil Evaluasi Renja Per Triwulanan Tahun 2025; 6). 2 (Dua) Laporan Evaluasi SPIP Tahun 2025; 7). 1 (Satu) Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2025.
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dokumen pelaporan evaluasi capaian kinerja merepresentasikan kinerja ASN dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai elemen pemerintahan. Untuk menghasilkan pelaporan evaluasi capaian kinerja yang akuntabel, diperlukan proses koordinasi, monitoring, konsolidasi, dsb. dengan berbagai instansi terkait secara berkala dalam satu tahun anggaran, tidak hanya dalam lingkup internal dinas, dan horizontal dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga secara vertikal dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Selain itu, untuk

	mendukung transparansi kepada masyarakat luas, maka laporan evaluasi capaian kinerja harus dapat diakses oleh masyarakat, begitu juga dengan proses pelaksanaan kegiatan yang dapat dipantau oleh masyarakat melalui media sosial maupun website dinas. Proses monitoring dan evaluasi dalam setiap program kegiatan sangat perlu dilaksanakan. Hal ini untuk memantau dan mengidentifikasi proses dan hasil pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada proses perencanaan. Monitoring dilaksanakan ke lapangan Selain itu juga untuk mengetahui kendala dan hambatan yang kemungkinan muncul sehingga kedepannya dapat dicegah agar tidak terjadi lagi. Hasil dari monitoring dan evaluasi ini sebagai masukan dalam perencanaan berikutnya. Terkait dengan perihal tersebut maka diperlukan suatu kegiatan yang dapat mewadahi proses monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut. Pada pelaksanaan proses penyusunan dokumen evaluasi kinerja di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diwadahi dalam Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah melalui Kegiatan Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Diharapkan melalui pelakasanaan kegiatan ini dokumen evaluasi kinerja yang dihasilkan dapat lebih berkualitas dan menjadi umpan balik bagi proses perencanaan kedepannya.
E. Lingkup kegiatan	: **a). Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Menyusun dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **Permasalahan** Pergerakan data capaian program/ kegiatan yang dinamis dapat mengakibatkan adanya ketidaksinkronan antar dokumen laporan capaian kinerja yang menjadikan laporan tidak akuntabel. **Hasil/*Outcome*** Tersusunnya dokumen evaluasi dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah yang terukur dan akuntabel pada pelaksanaan tahun anggaran kegiatan. **Dampak/*Impact*** Adanya perbaikan dan peningkatan kinerja SKPD serta dokumen pelaporan capaian dan evaluasi kinerja SKPD yang berkualitas. **b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan (swakelola, kontraktual, hibah, bansos atau kerjasama);** **Swakelola :** untuk pelaksanaan kegiatan rutin seperti penyediaan makan minum, rapat dan penyusunan dokumen maupun laporan **c). Kebutuhan Waktu;** 12 (Dua Belas) bulan **d). Siapa yang terlibat;** OPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat

F. Komponen kegiatan	:	
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
– Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja pegawai untuk tenaga pendukung teknis kegiatan (S1) sebanyak 2 (Dua) orang selama 12 (dua belas) bulan.
– Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Narasumber yang terdiri dari Kepala OPD terkait pelaporan dan evaluasi kinerja maupun penganggaran. – Narasumber yang terdiri dari Tim Legislatif terkait evaluasi kinerja daerah.
– Koordinasi	:	– Koordinasi secara intensif akan dilaksanakan dengan lingkup internal Disperakim Provinsi Jawa Tengah serta OPD, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Pusat terkait capaian kinerja urusan Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan urusan Pertanahan. – Koordinasi juga akan dilaksanakan dengan OPD lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang merupakan koordinator atau pengampu penyusunan laporan evaluasi kinerja.
– Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan akan dilakukan dalam rangka memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh bidang pengampu serta mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya; – Pihak yang terlibat yakni OPD TAPD (BAPPEDA dan BANGDA dan BPKAD Prov. Jateng), OPD Kab/ Kota, Pemerintah Desa dan masyarakat/penerima bantuan.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024 : Rp. 470.000.000,-* *Th 2025 : Rp. 492.856.000,-* *Th 2026 : Rp. 500.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman pelaksanaan Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2025.

Semarang, 2 Januari 2025

Sekretaris

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut,MSi

Pembina Tk. I

NIP. 19731113 199803 1 003

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH TA. 2025

NO	KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pengawasan dan Monev Tingkat SKPD TA 2025												
2	Penyusunan LKPJ Tahun 2024												
3	Penyusunan LKjIP Tahun 2024 (LkjIP 2024 dan LKj Pejabat Struktural TH. 2024)												
4	Penyusunan LPPD TH. 2024												
5	Penyusunan Laporan Evaluasi RKPD Triwulanan dan SAKIP Triwulanan TH. 2025												
6	Penyusunan Laporan Evaluasi SPIP Th. 2025 (Semester 1 dan 2)												
7	Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2025												

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Iventarisasi aset
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1 laporan Pemanfaatan BMD
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikannya. Dengan sistem informasi data yang baik dan lengkap, pelaksanaan pengelolaan aset daerah akan lebih mudah dan cepat apabila dibutuhkan data mengenai aset daerah sewaktu-waktu, serta dalam pembuatan penyusunan laporan menjadi lebih mudah dan informatif. Pemerintah daerah harus memperhatikan strategi dan kebijakan yang tepat terkait pengelolaan aset daerah agar dapat menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam pelaksanaan pengelolaan aset daerah.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan Tujuan Pengelolaan barang milik daerah adalah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan sehingga terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan barang serta terwujudnya pengelolaan barang yang tertib, efektif dan efisien. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD dengan metode e-purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan dengan instansi terkait. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, Triwulan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 5.000.000,- : Rp. 5.000.000,- : Rp. 7.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemanfaatan BMD	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Iventarisasi aset
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	- 4 laporan Triwulan - 2 Laporan Semesteran - 1 Laporan Tahunan
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Penyusunan laporan keuangan membutuhkan data keuangan dan data aset yang valid serta akuntabel, Rekonsiliasi dan inventarisasi perlu dilakukan untuk memperoleh data yang valid terhadap realisasi belanja modal, realisasi belanja pemeliharaan disetiap SKPD dan mutasi yang terjadi selama periode pelaporan. Kegiatan rekonsiliasi melibatkan pejabat pengelola aset (barang milik daerah) di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Rekonsiliasi dilaksanakan 3 kali dalam satu tahun yang terdiri dari rekonsiliasi Triwulan, Semesteran dan Laporan Tahunan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** *Maksud dan Tujuan pelaksanaan kegiatan adalah diperolehnya nilai aset yang valid dan* akuntabel pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dalam penyusunan Laporan Keuangan. Prosesnya melalui kegiatan rekonsiliasi dan inventarisasi terhadap data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) khususnya belanja pemeliharaan dan belanja modal, dan semua mutasi tambah kurang yang terjadi dalam kurun periode pelaporan yang telah diverifikasi oleh Tim Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset SKPD. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

	▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Jasa.	
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: – **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan dengan instansi terkait. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, Triwulan, semesteran dan pada akhir kegiatan.	
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 15.000.000,- : Rp. 5.000.000,- : Rp. 15.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan Laporan Triwulan	Pelaksanaan												
1	Penyusunan Laporan Semesteran	Pelaksanaan												
1	Penyusunan Laporan Tahunan	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penngadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Tersedianya sarana dan prasarana kantor
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 2 unit Komputer All in One 2) 2 unit Printer 3) 2 unit Scanner 4) 1 set Alat Olah Raga (Gate Ball)
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Mengingat kebutuhan perlengkapan kantor yang sangat penting, maka diperlukan prasarana dan sarana yang dapat menunjang kinerja para pegawai. Untuk itu maka diperlukan sarana yang memadai yang dapat memberikan kenyamanan dalam bekerja dapat meningkatkan etos kerja yang tinggi. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan Etos kerja yang tinggi, suasana kenyamanan kerja menjadi keharusan sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada para karyawan menjadi optimal dalam meningkatkan kinerja para pegawai secara keseluruhan. Sehingga dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi pembangunan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan adalah sebagai upaya memberikan kenyamanan dalam tugas-tugas pelayanan yang baik bagi para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja para pegawai, dan kebutuhan akan prasarana dan sarana terpenuhi sehingga peningkatan kinerja dapat diharapkan sesuai dengan tugas yang dibebankan. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin sarana kantor dan rumah tangah dengan metode e-purchasing.

	▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah dan Penyedia.	
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: – **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** *Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern.* – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan spesifikasi pengadaan barang yang dibutuhkan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pekerjaan.	
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 750.000.000,- : Rp. 90.000.000,- : Rp. 650.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 0039

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pengadaan Komputer, Printer dan Scanner	1. Proses pengadaan												
		2. Pelaksanaan												
2	Pengadaan Alat Olah Raga Gate Ball	1. Proses Lelang												
		2. Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terjaminya barang milik daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 14 unit Kendaraan Roda-4 dan 7 unit Kendaraan Roda-2 2) 2 Gedung Kantor
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Dalam rangka menunjang kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah untuk Aset Daerah di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan Tujuan kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah sebagai penunjang Jaminan Aset-aset Gedung dan Kendaraan Operasional Dinas yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan			
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**			
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --		
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –		
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dana belanja premi asuransi untuk memantau progress pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.	
4. Tinjauan lapangan	: --		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –		
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –		
G. Anggaran	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 155.000.000,- : Rp. 155.000.000,- : Rp. 165.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Asuransi Kendaraan Operasinal Dinas dan Asuransi 2 Gedung Kantor	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya Kebutuhan Barang
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1 laporan
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Barang milik daerah memerlukan pengelolaan agar dapat menunjang kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Dalam PP Nomor 27 Tahun 2014, ruang lingkup pengelolaan BMN/D adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan Tujuan Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan BMD dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 10.000.000,- : Rp. 10.000.000,- : Rp. 12.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyusunan Rencana Kebutuhan BMD	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian**
Dukungan terhadap indikator Program	:	ASN Disperakim Prov. Jateng
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	- 1 tahun dapat menfasilitasi ASN dalam hal kepegawaian - 83 ASN mengikuti kemutahiran data kepegawaian
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• ***Dasar Hukum*** - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. - Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera. - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. • **Gambaran Umum** Pengelolaan adminisgtrasi kepegawaian merupakan proses yang tidak mudah untuk dituntaskan dan akan mengalami perubahan yang terus menerus baik karena adanya tuntutan baru yang sesuai kebutuhan. Pengelolaan administrasi kepegawaian yang terkodinir perlu memiliki system pengendalian, baik dalam pelaporan pengelolaan file kepegawaian. Pengelolaan administrasi kepegawaian meliputi penanganan pegawai sejak diangkat menjadi CPNS sampai saat diberhentikan karena mencapai batas usia pensiun atau sebab-sebab lainnya. Disamping itu administrasi kepegawaian mencakup pula pola kegiatan penangan data kepegawaian yaitu pengumpulan, pencatatan penyimpanan, pendistribusian dan pemeliharaan file-file kepegawaian dan lain sebagainya.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Tujuan Pengelolaan Administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah adalah penjagaan terhadap Kenaikan Pengkat, Pensiun, laporan perubahan data pegawai, mutasi, promosi, serta penjagaan terhadap jabatan yang kosong di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

- **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan**
  Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dengan metode Swakelola, Pengadaan Langsung dan –e-purchasing.

- **Kebutuhan Waktu**
  Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

- **Yang Terlibat**
  Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait guna mendapat informasi kepegawaian. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk memenuhi kelengkapan administrasi ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan.
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 30.000.000,- : Rp. 20.000.000,- : Rp. 50.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	*KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pendataan dan* Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pendataan dan Pengelolaan Data	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan**
Dukungan terhadap indikator Program	:	ASN Disperakim Prov.Jateng
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	83 ASN Disperakim Prov. Jateng
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government (penyelenggaraan negara yang bertanggungjawab dan pemerintahan yang bersih) memerlukan instrument atau alat yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab negara pada rakyat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai alat yang dimaksud harus mampu menerjemahkan dan melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan untuk mencapai tujuan negara (pemerintah baik pusat maupun daerah). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai unsur negara dan abdi masyarakat harus dapat menjadi teladan bagi masyarakat dalam berbagai hal. Oleh karena itu dalam rangka meningkatakan kualitas dan kapabilitas ASN yang handal dalam memberikan pelayanan diperlukan suatu pembinaan dan bimbingan secara terus menerus dan berkesinambungan. Sistem manajemen yang baik juga harus didukung oleh SDM yang berkualitas dan mampu mengoperasionalkan sistem tersebut. Oleh karena itu guna mewujudkan perihal tersebut Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah perlu menyelenggarakan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Adapun Maksud dari Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan tujuan Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan adalah memberikan bimbingan dan ketrampilan Aparatur Sipil Negara (ASN).

- **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan**
  Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dengan metode Swakelola, Pengadaan Langsung dan e-purchasing.

- **Kebutuhan Waktu**
  Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

- **Yang Terlibat**
  Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	--
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan dengan instansi terkait guna pelaksanaan Bintek implementasi peraturan perundang-undangan yang akan diikuti oleh seluruh pegawai. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan materi yang akan disosialisasikan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan.
4. Tinjauan lapangan	:	--

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	–
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	–

G. Anggaran	:	Th 2024	: Rp. 10.000.000,-
		Th 2025	: Rp. 10.000.000,-
		Th 2026	: Rp. 10.000.000,-

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)

H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Bintek Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai**
Dukungan terhadap indikator Program	:	ASN Disperakim Prov. Jateng
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1 laporan Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai 83 ASN mengikuti Penilaian Kinerja pegawai dan Input Data
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** - Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. - Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera. - Keputusan Menteri Dalam Negeri No.17 tahun 2000 tentang Sistem Informasi Manajemen kepegawaian Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. • **Gambaran Umum** Sumber daya manusia keberadaannya memegang peranan sangat penting di dalam suatu organisasi. Sumber daya manusia merupakan orang-orang yang memberikan pikiran, kreativitas, tenaga dan usahanya untuk tempatnya bekerja. Untuk mewujudkan SDM yang profesional dan kompeten sesuai nilai-nilai organisasi maka setiap PNS berkewajiban berkewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya serta mempertanggungjawabkan kinerjanya.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkap pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil capaian. Tujuan Penilaian Kinerja Pegawai untuk menjamin objektivitas pembinaan pegawai yang didasarkan pada system prestasi dan system karier. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja pegawai dengan metode Swakelola.

- **Kebutuhan Waktu**
  Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

- **Yang Terlibat**
  Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai : --
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar :
3. Koordinasi : –

Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :
Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait guna mendapat informasi kepegawaian.

– **Tujuan koordinasi yang dilakukan :**
Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan penailaian kinerja ASN dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

– **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :**
Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat.

– **Frekuensi kebutuhan dan waktu :**
Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan.

4. Tinjauan lapangan : --

- **Kebutuhan Belanja Modal**

1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang : –
2. Pengadaan tanah/ lahan : –

G. Anggaran : Th 2024 : Rp. 30.000.000,-
Th 2025 : Rp. 20.000.000,-
Th 2026 : Rp. 40.000.000,-

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)

H. Penutup : KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Pegawai, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pencapaian Kinerja Pegawai
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan**
Dukungan terhadap indikator Program	:	ASN Disperakim Prov.Jateng
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	83 ASN Disperakim Prov. Jateng
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai Negeri Sipil, wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Penerapan peraturan perundang-undangan sebagai lengkah pembinaan dan penegakan disiplin pegawai pada era keterbukaan. Untuk itu diperlukan sumber daya aparatur yang memadai baik pengetahuan dan ketrampilannya.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya aparatur dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

	▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dengan metode Swakelola. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.dan Penyedia Jasa.	
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	
3. Koordinasi	: – **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan dengan instansi terkait guna pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang akan diikuti oleh seluruh pegawai. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan materi yang akan disosialisasikan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan.	
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 25.000.000,- : Rp. 10.000.000,- : Rp. 35.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi**
Dukungan terhadap indikator Program	:	ASN yang mengikuti diklat/workshop/seminar
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1 tahun dapat menfasilitasi ASN mengikuti kurus-kursus singkat/pelatihan
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Keberhasilan pelaksanaan pembangunan Sumber Daya Manusia, Aparatur Pemerintah, sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan kepegawaian terutama aspek rekrutmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan karier di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Kualitas perencanaan kepegawaian khususnya pendidikan dan pelatihan aparatur sangat ditentukan oleh akurasi, validasi dan reabilitasi data aparatur Pemerintah berupa data kuantitatif maupun data kualitatif dengan didukung oleh analisis jabatan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** *Maksud dan tujuannya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan sumber daya aparatur di* lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah di masa datang, khususnya Sumber Daya Aparatur Pemerintah yang memiliki kualitas tinggi dan berhasil guna. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan pendidikan formal dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi dengan instansi terkait guna mendapat informasi kepegawaian, kursus-kursus singkat/pelatihan yang akan diikuti oleh pegawai. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan kursus-kursus singkat/palatihan yang akan diikuti oleh pegawai. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Instansi terkait Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pusat. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada persiapan pelaksanaan pekerjaan, pada tahap pelaksanaan dan pada akhir pelaksanaan.
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 60.000.000,- : Rp. 50.000.000,- : Rp. 70.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Koordinasi Instansi Terkait	Pelaksanaan												
2	Mengikuti Kursus-Kursus Singkat/ Perlatihan	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya kebutuhan peralatan
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	- 60 jenis ATK
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Guna kelancaran dan pelaksanaan tugas aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan fasilitas bahan/material yang dibutuhkan yaitu Alat Tulis Kantor. Sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada para karyawan menjadi optimal dalam meningkatkan kinerja para pegawai secara keseluruhan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan Tujuan terpenuhinya penyediaan peralatan perlengkapan kantor, dalam rangka menunjang tugas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan kedinasan menyediakan peralatan Alat Tulis Kantor. Tujuan kegiatan agar tersedianya alat-alat dan bahan penunjang kegiatan kedinasan sehari-hari. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan dilakukan pembelian setiap bulan sesuai kebutuhan ASN dengan metode pengadaan e-purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: -	**Kebutuhan belanja Pegawai untuk mendukung output (Tim Teknis/Non Teknis)** - - **Kebutuhan Jumlah/Waktunya** -
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – ***Tujuan koordinasi yang dilakukan :*** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan antar bidang dan sekretariat dalam satu tahun sehingga dalam menjalankan tugas ASN terfasilitasi. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Tinjauan lapang	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 75.000.000,- : Rp. 50.000.000,- : Rp. 75.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyediaan ATK	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya pelayanan melalui media elektronik
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) Media Cetak 2) Media Elektonik 3) Mengikuti Pameran PRPP 4) Tenaga Pendukung S1 (2 orang) 5) Pelaksanaan PPID
2. Lokasi	:	*Kota Semarang*
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Informasi Publik adalah informasi yang di hasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pengadaan Tenaga Teknis guna menunjang pelaksanaan system secara manual dan elektronik.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan informasi guna kepentingan publik guna mengetahui program kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. Tujuan kegiatan tersedianya informasi guna penyampaian informasi tentang tupoksi dan hasil kerja yang bisa dirasakan oleh publik/masyarakat secara langsung atau jangka panjang. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan dengan metode Swakelola, Pengadaan Langsung dan e-Purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan			
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**			
1. Kebutuhan belanja pegawai	: -	**Kebutuhan belanja Pegawai untuk mendukung output (Tim Teknis/Non Teknis)** Kebutuhan Pegawai Non PNS Tenaga Teknis Informasi, guna mendukung informasi kedinasan terkelola dengan baik. - **Kebutuhan Jumlah/Waktunya** Tenaga yang dibutuhkan 2 (dua) orang, dengan tingkat pendidikan S1, waktu/masa kerja selama 12 (dua belas) bulan.	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –		
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan antar bidang dan sekretariat dalam satu tahun sehingga dalam menjalankan tugas ASN terfasilitasi. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.	
4. Tinjauan lapang	: --		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –		
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –		
G. Anggaran	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 300.000.000,- : Rp. 330.000.000,- : Rp. 300.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Tenaga Teknis & Administrasi	Pelaksanaan												
2	Publikasi	Pelaksanaan												
3	Pameran PRPP	Pelaksanaan												
5	PPID	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahanan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) Semua Arsip Vital 2) Semua Arsip Aktif 3) Semua Arsip Inaktif 4) 40 org mengikuti sosialisasi Kearsipan
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. • **Gambaran Umum** Arsip Dinamis merupakan rekaman yang masih digunakan sebagai berkas kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi, sehingga harus dikelola dengan baik dan sistematis. Pengelolaan arisp dinamis adalah proses pengendalian arsip dinamis secara efisien, efektif dan lengkap meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan serta penyusutan arsip.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud kegiatan arsip dinamis adalah agar arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Tujuan, terlaksananya sosialisasi kearsipan bagi ASN sehingga penataan atau pengelolaan arsip agar terpelihara dengan baik dan aman, bisa dengan mudah ditemukan kembali arsip yang dibutuhkan tersebut dengan cepat dan tepat, terhindar dari pemborosan tenaga dan waktu dalam kegiatan pencarian arsip yang dibutuhkan. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD dengan metode Swakelola, Pengadaan Langsung dan e-purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah dan Penyedia Jasa.

F. Komponen kegiatan			
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**			
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --		
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –		
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi pelaksanaan penatausahaan arsip dinamis untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kasubag, Sub Koordinator dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, Triwulan, Semesteran dan pada akhir kegiatan.	
4. Tinjauan lapangan	: --		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –		
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –		
G. Anggaran	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 100.000.000,- : Rp. 100.000.000,- : Rp. 60.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penataan Arsip Dinamis	Pelaksanaan												
2	Pengadaan Lemari Arsip	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Bahan Logistik Kantor**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya bahan bakar minyak kendaraan operasional dan genset.
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 14 unit Kendaraan Roda-4 2) 13 unit Kendaraan Roda-2 3) 1 unit Genset
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Mobilitas dari Kendaraan Dinas Operasional yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dan untuk menjaga sarana tersebut, dibutuhkan BBM secara rutin dan berkala agar kendaraan operasional dapat selalu siap bilamana dibutuhkan. Penyediaan bahan bakar guna menunjang aktivitas kerja.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan adalah untuk menyediakan bahan logistik kantor berupa BBM untuk operasional kendaraan dinas/operasional, penyediaan bahan bakar genset guna menunjang kegiatan pegawai. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan penyediaan bahan bakar kendaraan operasional dinas dilakukan setiap bulan dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan prioritas operasional kendaraan dinas.. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: –	**Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk membuatan skala prioritas kendaraan operasional dinas. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 300.000.000,- : Rp. 300.000.000,- : Rp. 325.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyediaan BBM Kendaraan Dinas	Pelaksanaan												
2	Penyediaan BBM Genset	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketercapaian Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Peningkatan Sumber Daya Aparatur dalam Penguasaan Pengetahuan dan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	4 Langganan Surat Kabar/Koran 2 Langganan Majalah 1 paket buku perpustakaan
2. Lokasi	:	Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Dalam Rangka menunjang kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan peraturan perundang-undangan dan/atau Buku Perpustakaan Perangkat Daerah untuk menambah wawasan, ilmu Pengetahuan dan Informasi di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna. Diperlukannya dan tersedianya bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dalam penyajian informasi dalam rangka meningkatkan Wawasan Sumber Daya Aparatur Daerah yang baik terhadap Pelaksanaan Kegiatan-kegiatan
E. Lingkup kegiatan	:	**a). Maksud dan Tujuan kegiatan;** Maksud untuk kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/ Buku Perpustakaan Perangkat Daerah sebagai penunjang Sumber Daya Aparatur PNS yang ditujukan memenuhi kebutuhan Aparatur di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang berawasan luas Terwujudnya kesediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah **b). Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan;** Pelaksanaan kegiatan dilaksananan setiap bulan untuk langganan Koran dan majalah, dengan metode Pengadaan Langsung. **c). Kebutuhan Waktu;** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. **d). Siapa yang terlibat;** ASN DISPERAKIM, Rekanan Penyedia Bahan Bacaan

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja Surat Kabar/ Majalah – Kebutuhan Belanja Pengadaan Buku
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Koordinasi dana belanja Surat Kabar/Majalah dan Pengadaan Buku – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dana belanja Surat Kabar/Majalah dan Pengadaan Buku untuk memantau progres pelaksanaan kegiatan serta mengidentifikasi dan mengatasi permasalah yang mungkin muncul dalam proses pelakasanaan kegiatan – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pengelola Kegiatan (ASN DISPERAKIM) dan Penyedia Bahan Bacaan – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Koordinasi dana belanja Surat Kabar/Majalah dan Pengadaan Buku Kegiatan Tahun Berjalan dilaksanakan secara bulanan dalam setahun
4. Tinjauan lapang	:	– **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** a). Memantau progres fisik pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh tim pengampu. b). Mengetahui output, outcome dan impact dari pelaksanaan kegiatan tersebut sebagai bahan evalusi pelaksanakan kegiatan tahun berikutnya. – **Pihak yang terlibat :** ASN DISPERAKIM
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	–
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	–
G. Anggaran	:	Th 2024 : Rp. 20.000.000 Th 2025 : Rp. 20.000.000 Th 2026 : Rp. 20.000.000
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang undangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Belanja Surat Kabar/Majalah	Pelaksanaan												
2	Pengadaan Buku Peraturan	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG CETAK DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	- 10 jenis bahan cetak - Penggandaan/Foto copy dokumen
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Beberapa jenis pekerjaan administrasi menuntut penggunaan blanko dalam formulir serta surat- surat penting yang di arsip, maka diperlukan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dalam pekerjaan, untuk kelancaran pekerjaan administrasi.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Menyediakan barang cetak dan penggandaan bagi penyelesaian tugas dinas dan terpenuhinya blanko/formulir, barang cetakan dan penggandaan guna memperlancar pekerjaan administrasi. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan dilaksananan untuk bahan cetak pada awal bulan sedangkan *penggandaan/FC dilaksananan setiap bulan dengan metode* Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	--
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.

	– **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan antar bidang dan sekretariat dalam satu tahun sehingga dalam menjalankan tugas ASN terfasilitasi, serta penataan arsip kedinasan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.	
4. Tinjauan lapang	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 30.000.000,- : Rp. 20.000.000,- : Rp. 30.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Barang Cetak	Pelaksanaan												
2	Penggandaan / Foto Copy	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN ISTALASI LISTRIK/ PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya penerangan kantor
B. Sasaran Kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output Kegiatan		
1. Satuan	:	- 2 Gedung Kantor - 23 jenis komponen listrik
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar Belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Untuk memenuhi kebutuhan Dinas agar proses bekerja dapat berjalan dengan lancar, dan menunjang kinerja para pegawai perlu adanya prasarana dan sarana yang memadahi serta fasilitas kerja yang mendukung dengan peneranngan yang baik.
E. Lingkup Kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan dialokasikan kegiatan adalah untuk melengkapi bangunan gedung kantor dengan penerangan guna mendukung kelancaran aktifitas kerja pegawai. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, pembelian komponen listrik dilakukan setiap bulan sesuai kebutuhan dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah dan Penyedia Barang.

F. Komponen Kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinas intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan penerangan kantor. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi penyediaan penerangan kantor.
4. Tinjauan lapangan	: –	**Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk meninjau fasilitas prasarana listrik. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 50.000.000,- : Rp. 50.000.000,- : Rp. 60.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Instalasi Listrik/Penerangan kantor	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025.

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya kebutuhan peralatan
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	- 5 janis bahan kegiatan kantor - 17 tabung pemadam kebakaran
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Guna kelancaran dan pelaksanaan tugas aparatur dalam menjalankan tugas sehari-hari perlu didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi. Dalam pelaksanaan tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan fasilitas bahan/material yang dibutuhkan yaitu peralatan rumah tangga dan pengisian tabung pemadam kebakaran. Sehingga suasana kerja menjadi aman dan nyaman agar pekerjaan yang dibebankan kepada para karyawan menjadi optimal dalam meningkatkan kinerja para pegawai secara keseluruhan.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Terpenuhinya penyediaan peralatan rumah tangga guna kebersihan alat-alat kantor dan ruang kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja, dan tersedianya alat pemadam kebakaran yang siap dipergunakan untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya kebakaran. Tujuan kegiatan agar tersedianya alat-alat dan bahan penunjang kegiatan kedinasan sehari-hari. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan untuk bahan pembersih/pewangi dilaksanakan setiap bulan sesuai kebutuhan, untuk tabung pemadam dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sesuai habis masa aktif ampar, dengan menggunakan metode e-purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah dan Penyedia Barang dan Jasa.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: -	**Kebutuhan belanja Pegawai untuk mendukung output (Tim Teknis/Non Teknis)** - - **Kebutuhan Jumlah/Waktunya** -
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern diilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan antar bidang dan sekretariat dalam satu tahun sehingga dalam menjalankan tugas ASN terfasilitasi. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Tinjauan lapang	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 20.000.000,- : Rp. 20.000.000,- : Rp. 20.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Pelaksanaan												
2.	Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	WAJIB PELAYANAN DASAR
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi h
A. Kegiatan	:	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**
Sub Kegiatan	:	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi perangkat daerah.
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 24 kali Rapat Koordinasi dan Evaluasi dalam 1 tahun. 2) 80 kali Rapat-repat intern kedinasan dalam 1 tahun. 3) 3 kali dalam rangka kegiatan kedinasan/perayaan 4) 373 kali pengisian galon air minum dalam 1 tahun. 5) Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 6) Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Dalam rangka meyelenggarakan rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah maka diperlukan kebutuhan untuk menunjang kegiatan tersebut dengan menyediakan kebutuhan makan dan minum untuk konsumsi rapat selain itu agar pegawai dalam mengerjakan tugas sehari-hari lebih nyaman, maka disediakan fasilitas minuman di dalam ruangan. Dalam melaksanakan kegiatan kedinasan makan perlu fasilitas untuk menunjang pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi baik di dalam daerah maupun di luar daerah.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan dialokasikan ini untuk menunjang pelaksanaan rapar-rapat dan koordinasi bagi pegawai di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, dan peserta rapat dari dinas/ instansi lain. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan dengan metode Swakelola dan untuk makanan dan minuman rapat dengan metode e-purchasing. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

	▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.	
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: – **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinas intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan agar terpenuhinya prasarana dan sarana kebutuhan rapat dan koordinasi didaerah bagi pegawai guna kelancaran pelaksanaan tugas. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.	
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 850.000.000 : Rp. 820.000.000 : Rp. 850.000.000
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordonasi dan Konsultasi SKPD, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Rapat Koordinasi dan Evaluasi	Pelaksanaan												
2	Rapat-Rapat Intern	Pelaksanaan												
3	Kegiatan Kedinasan/Perayaan	Pelaksanaan												
4	Penyediaan Isi Ulang Air Minum	Pelaksanaan												
5	Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Pelaksanaan												
6	Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
Satuan	:	1) 14 Kendaraan Roda-4 2) 7 Kendaraan Roda-2
1. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Mobilitas dari Kendaraan Dinas Operasional yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dan untuk menjaga sarana tersebut, dibutuhkan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar kendaraan operasional dapat selalu siap bilamana dibutuhkan, dan kondisinya terawat, sehingga pemakainya juga terjaga.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan adalah untuk melakukan pemeliharaan perawatan asset dinas yang berupa kendaraan dinas/operasional, serta penyediaan bahan bakar guna menunjang operasional kegiatan pegawai. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan prioritas pemeliharaan kendaraan dinas.. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: –	**Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk membuatan skala prioritas gedung yang akan dipelihara dan kendaraan operasional dinas. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 239.000.000,- : Rp. 240.000.000,- : Rp. 250.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemeliharaan Kendaraan Operasional Dinas	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN MEBEL
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pemeliharaan Mebel**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpeliharanya mebeleur
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 7 jenis alat rumah tangga (Meja Kerja, Kursi Kerja, Almari Kayu, Kursi Rapat, Meja Rapat, Filling Kabinet dan Kursi Tamu).
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Sarana mebelair merupakan sarana kerja yang penting di kantor, baik itu berupa meja kerja, kursi kerja, lemari file dan lain-lain. Tanpa adanya mebelair suatu kantor yang sifatnya melaksanakan fungsi administrasi tidak mungkin dapat beraktifitas.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud pemeliharaan mebeleur dalam upaya memberikan sarana kerja yang layak bagi pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat. Tujuannya untuk memelihara dan memperbaiki sarana kerja dinas agar layak/memadai bagi *pelaksanaan tugas*. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin sarana kantor dan rumah tangah dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan			
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**			
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --		
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –		
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk membuat skala prioritas sarana kantor dan rumah tanggah yang akan diperbaiki. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.	
4. Tinjauan lapangan	: --		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –		
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –		
G. Anggaran	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 20.000.000,- : Rp. 20.000.000,- : Rp. 20.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemeliharaan Meja dan Kursi	Pelaksanaan												
2	Pemeliharaan Almari Kayu dan Besi	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Tercukupinya Pemeliharaan Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 65 unit pemeliharaan komputer 2) 65 unit pemeliharaan printer 3) 10 unit pemeliharaan laptop
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Pemeliharaan peralatan kantor sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga peralatan kantor dari kerusakan yang lebih parah, Selama itu dengan pemeliharan yang baik dan kontinyu dapat dilakukan penghematan karena tidak perlu membeli alat-alat yang baru, selain alat tersebut masih dapat digunakan dan masih sesuai dengan perkembangan teknologi.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Sebagai upaya menyediakan sarana yang memadai dalam melaksanakan tugas kantor dan melaksanakan pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor untuk memenuhi kebutuhan alat kerja guna melaksanakan tugas sehari - hari. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin sarana kantor dan rumah tangah dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan			
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**			
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --		
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –		
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk membuat skala prioritas sarana kantor dan rumah tanggah yang akan diperbaiki. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.	
4. Tinjauan lapangan	: --		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –		
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –		
G. Anggaran	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 70.000.000,- : Rp. 70.000.000,- : Rp. 75.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)			
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemeliharaan Komputer/Laptop	Pelaksanaan												
2	Pemeliharaan Printer	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Tercukupinya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor dan Terpeliharanya Gedung Kantor
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 65 unit pemeliharaan Alat Pendingin (AC) 2) 4 unit AC Standing Floor 5 PK 3) 4 unit AC Standing Floor 3 PK 4) 1 unit Pemeliharaan Genset 250 KVA 5) 2 Gedung Kantor
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Sarana perlengkapan Gedung Kantor antara lain berupa Air Condition (AC), pompa air, sumur artetis dan genset. Pemeliharaan secara rutin dan berkala terhadap perlengkapan gedung kantor akan memelihara sarana tersebut dari kerusakan sama seperti sarana-sarana lainnya, bila terpelihara dengan baik akan merupakan penghematan, karena masa pakainya akan lebih lama dan tidak perlu membeli baru. Gedung Kantor merupakan sarana kerja terpenting, karena merupakan lokasi kerja dan bersifat seperti " Rumah " bagi pegawainya. Untuk itu perlu dipelihara secara rutin agar tetap dapat digunakan untuk tempat kerja, dan para pegawai merasa nyaman dalam menjalankan tugas.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan pekerjaan adalah memelihara dan memperbaiki sarana perlengkapan gedung kantor agar lebih awet dan panjang masa pakainya, dan melakukan pemeliharaan rutin dan berkala. Memelihara dan meningkatkan kondisi gedung kantor tetap terawat, mengamankan dan menjaga gedung kantor dari semua unsur yang menyebabkan kerusakan

- **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan**
  Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan perlengkapan kantor dengan metode Pengadaan Langsung.

- **Kebutuhan Waktu**
  Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan.

- **Yang Terlibat**
  Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk membuat skala prioritas sarana kantor dan rumah tangga yang akan diperbaiki serta pemeliharaan gedung kantor. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 300.000.000,- : Rp 340.000.000,- : Rp. 330.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi *Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemeliharaan AC	Pelaksanaan												
2	Pemeliharaan Genset	Pelaksanaan												
3	Pemeliharaan Gedung Kantor	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Pejabat**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
Satuan	:	1) 2 Kendaraan Roda-4
1. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Mobilitas dari Kendaraan Dinas Operasional yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sangat tinggi dan untuk menjaga sarana tersebut, dibutuhkan pemeliharaan secara rutin dan berkala agar kendaraan operasional dapat selalu siap bilamana dibutuhkan, dan kondisinya terawat, sehingga pemakainya juga terjaga.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksut dan tujuan kegiatan ini sebagai upaya untuk memelihara dan perawatan rutin kendaraan dinas jabatan. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk menentukan prioritas pemeliharaan kendaraan dinas.. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Subag Umpeg, dan staf yang berkompeten. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan.
4. Tinjauan lapangan	: –	**Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk membuatan skala prioritas kendaraan operasional dinas. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 50.000.000,- : Rp. 50.000.000,- : Rp. 60.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional atau Lapangan
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pemeliharaan Rutin Kendaraan Dinas	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 2 Gedung Kantor Jasa Komunikasi 2) 2 Gedung Kantor Jasa Air 3) 2 Gedung Kantor Jasa Listrik
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Untuk memenuhi kebutuhan Dinas agar proses bekerja dapat berjalan dengan lancar, dan menunjang kinerja para pegawai perlu adanya prasarana dan sarana yang memadahi. Khususnya sarana telekomunikasi, sumber daya listrik dan sumber daya air.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan dialokasikan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik adalah untuk membayar rekening bulanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik dengan metode Swakelola. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: --	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinas intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jasa Komunikasi, Air dan Listrik, guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik.
4. Tinjauan lapangan	: –	**Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk meninjau fasilitas prasarana komunikasi, air dan listrik. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 575.000.000,- : Rp. 479.000.000,- : Rp. 575.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januiari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Jasa Komunikasi	Pelaksanaan												
2	Jasa Air	Pelaksanaan												
3	Jasa Listrik	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya jasa kebersihan dan keamanan gedung kantor
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 2 paket jasa tenaga kebersihan kantor 2) 1 paket jasa tenaga keamanan 3) 1 paket jasa tenaga Sopir 4) 2 tenaga pendukung 5) 1 Tenaga Instruktur Senam
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Mengingat kebersihan dan keamanan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah untuk 2 gedung yang sangat penting guna menjaga kesehatan di lingkungan kerja maka diperlukan pemeliharaan akan kebersihan agar suasana kerja menjadi nyaman, sehat,rapi dan bersih serta aman. Sarana dan prasarana ini sangat dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kebersihan dan keamanan agar suasana kerja menjadi nyaman sehingga pekerjaan yang dibebankan kepada para karyawan menjadi optimal.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud dan tujuan kegiatan adalah menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kebersihan dan keamanan kantor untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman aman dan sehat terhindar dari segala kotoran dan bau. Tenaga pendukung kegiatan guna membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, jasa tenaga sopir untuk kelancaran pimpinan dalam menjalankan tugas pekerjaan baik didalam daerah maupun luar daerah. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa kebersihan dengan metode Pengadaan Langsung dan e-purchasing.

	▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.	
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: -	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: – **Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinas intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan jasa guna menunjang pelaksanaan tugas dinas. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi penyediaan jasa.	
4. Tinjauan lapangan	: – **Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan** Peninjauan lapangan di intern Dinas PERAKIM Prov. Jateng, yang bertujuan untuk meninjau fasilitas prasarana kebersihan dan keamanan. – **Pihak yang terlibat :** Pejabat dan staf pelaksana Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 995.000.000,- : Rp. 1.150..000.000,- : Rp. 1.200.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	: KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Gedung-1	Pelaksanaan												
2	Jasa Tenaga Kebersihan Kantor Gedung-2	Pelaksanaan												
3	Jasa Tenaga Keamanan	Pelaksanaan												
4	Jasa Tenaga Sopir	Pelaksanaan												
5	Jasa Tenaga Pramusaji	Pelaksanaan												
6	Tenaga Teknis dan Administrasi	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Program	:	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
A. Kegiatan	:	**Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
Sub kegiatan	:	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**
Dukungan terhadap indikator Program	:	Terpenuhinya pelayanan jasa surat menyurat perangkat daerah.
B. Sasaran kegiatan	:	Aparat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	1) 2 orang Tenaga Teknis Kearsipan Perangkat Daerah (D3) 2) 1 orang Tenaga Teknis (S1) 3) 1 orang Tenaga Administrasi (SMA) 4) 2 Jenis Benda Pos
2. Lokasi	:	Kota Semarang
D. Latar belakang	:	• **Dasar Hukum** Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. • **Gambaran Umum** Distribusi kegiatan koordinasi dengan instansi di luar Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, diantaranya dilakukan dengan surat menyurat, pengiriman surat dilaksanakan melalui jasa pos. Untuk itu dibutuhkan penyediaan jasa guna pengiriman surat-surat tersebut. Pengadaan materai guna memenuhi administrasi surat perjanjian kerjasama. Pengadaan Tenaga Teknis guna menunjang mengelola arsip kedinasan baik secara manual dan elektronik.
E. Lingkup kegiatan	:	▪ **Maksud dan Tujuan Kegiatan;** Maksud kegiatan ini adalah melaksanakan distribusi surat menyurat dalam menunjang tugas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keadministrasian. *Tujuan kegiatan agar tersedianya jasa pos dalam melaksanakan kegiatan jasa surat* menyurat, sehingga surat tersebut terdistribusi dengan lancar.dan mengelola arsip perangkat daerah. ▪ **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Kegiatan** Pelaksanaan kegiatan dengan metode Pengadaan Langsung. ▪ **Kebutuhan Waktu** Jangka waktu yang dibutuhkan pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan. ▪ **Yang Terlibat** Yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini ASN Provinsi Jawa Tengah.

F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: -	**Kebutuhan belanja Pegawai untuk mendukung output (Tim Teknis/Non Teknis)** Kebutuhan Pegawai Non PNS Tenaga Teknis Kearsipan, guna mendukung tertibnya arsip kedinasan dan terkelola dengan baik. - **Kebutuhan Jumlah/Waktunya** Tenaga yang dibutuhkan 4 (empat) orang, dengan tingkat pendidikan SMA (1 orang) ,D3 (2 orang) dan S1 (1 orang), waktu/masa kerja selama 12 (dua belas) bulan.
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	
3. Koordinasi	: –	**Rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan :** Dalam pelaksanaan kegiatan koordinasi yang dibutuhkan adalah koordinasi intern dilingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Tujuan koordinasi yang dilakukan :** Koordinasi dilakukan bertujuan untuk mengetahui kebutuhan antar bidang dan sekretariat dalam satu tahun sehingga dalam menjalankan tugas ASN terfasilitasi, serta penataan arsip kedinasan. – **Pihak yang terlibat dalam koordinasi :** Pihak yang terlibat dalam koordinasi yaitu Sekretaris, Kepala Bidang, Subag, Kasi dan staf yang berkompeten di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah. – **Frekuensi kebutuhan dan waktu :** Dalam koordinasi pelaksanaan kegiatan dilakukan pada awal pelaksanaan kegiatan, semesteran dan pada akhir kegiatan guna evaluasi pelaksanaan pekerjaan.
4. Tinjauan lapang	: --	
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	: –	
2. Pengadaan tanah/ lahan	: –	
G. Anggaran	: Th 2024 Th 2025 Th 2026	: Rp. 185.000.000,- : Rp. 200.000.000,- : Rp. 215.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (terlampir)		
H. Penutup	:	KAK ini dibuat sebagai acuan/pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, sehingga dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

RINCIAN KEGIATAN DAN TAHAPAN PELAKSANAAN

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2025

NO	URAIAN KEGIATAN	KOMPONEN/RINCIAN KEGIATAN	TAHUN 2025											
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Tenaga Teknis/Kearsipan/Administrasi	Pelaksanaan												
2	Pengadaan Benda Pos	Pelaksanaan												

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah

NOVA ADIWIDANTO, S.Hut, M.Si
NIP. 19731113 199803 1 003

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Perumahan / Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Program	:	Pengembangan Perumahan
Kegiatan	:	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase rumah layak huni yang disediakan; Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana dan Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	2 dokumen
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 2. Tahapan penerapan SPM Perumahan Rakyat, yaitu: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan pemenuhan pelayanan dasar; d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Salah satu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan kondisi rumah dan lingkungannya di lokasi rawan bencana serta yang berpotensi terkena relokasi program pemerintah. 4. Hasil dari pendataan akan digunakan sebagai basis data dan ditindaklanjuti dengan verifikasi untuk usulan penanganan bencana dan relokasi sebagai pemenuhan pelaksanaan SPM.
E. Lingkup kegiatan	:	Maksud: Memperoleh data rumah di lokasi rawan bencana dan berpotensi terkena relokasi program pemerintah sebagai tahapan dalam pelaksanaan SPM. Tujuan:

Dipindai dengan CamScanner

		Data rumah di lokasi rawan bencana dan berpotensi terkena relokasi program pemerintah dapat digunakan untuk mendapatkan usulan calon penerima bantuan bencana dan relokasi program pemerintah.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	Tenaga Pendukung Kegiatan : - 1 (satu) orang (S1) Tenaga Teknis selama 12 (dua belas) bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	Narasumber: -
3. Koordinasi	:	Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	:	Pendataan rumah ke Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	- ATK; - Dekorasi dan dokumentasi; - Penggandaan/percetakan; - Ruang rapat; - Konsumsi rapat; - Mobil operasional/sewa.
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2024 : Rp 100.000.000,- Th 2025 : Rp 70.000.000,- Th 2026 : Rp 120.000.000,-
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		

Semarang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan

SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Identifikasi rumah di lokasi rawan bencana dan berpotensi terkena relokasi program pemerintah												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN VERIFIKASI PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ALAM ATAU TERKENA RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Perumahan / Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Program	:	Pengembangan Perumahan
Kegiatan	:	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase rumah layak huni yang disediakan; Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi yang Terverifikasi
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	2 dokumen
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 2. Tahapan penerapan SPM Perumahan Rakyat, yaitu: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan pemenuhan pelayanan dasar; d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Salah satu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi. Kegiatan ini dilaksanakan dengan pendataan masyarakat miskin calon penerima bantuan pembangunan dan rehabilitasi rumah bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program provinsi. 4. Hasil dari pendataan akan digunakan sebagai usulan penanganan bencana dan relokasi sebagai pemenuhan pelaksanaan SPM. 5. Target verifikasi TA 2024 sejumlah 2.000 BNBA calon penerima bantuan rumah korban bencana, terdampak relokasi program pemerintah, dan rumah *backlog*.
E. Lingkup kegiatan	:	Maksud:

Dipindai dengan CamScanner

		Memperoleh BNBA yang sesuai dengan kriteria penerima bantuan rumah korban bencana, terdampak relokasi program pemerintah, dan rumah *backlog* di Provinsi Jawa Tengah. Tujuan: BNBA hasil pendataan, verifikasi, dan validasi diusulkan untuk memperoleh bantuan rumah korban bencana, terdampak relokasi program pemerintah, dan rumah *backlog* di Provinsi Jawa Tengah.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	Tenaga Pendukung Kegiatan : - 1 (satu) orang S1 Tenaga Teknis selama 12 (dua belas) bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	
3. Koordinasi	:	Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	:	Verifikasi dan validasi ke Desa/Kelurahan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	- ATK; - Dekorasi dan dokumentasi; - Penggandaan/percetakan; - Ruang rapat; - Konsumsi rapat; - Mobil operasional/sewa.
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2024 : Rp 325.000.000,- Th 2025 : Rp 150.000.000,- Th 2026 : Rp 260.000.000,-
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		

Semarang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan

SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Pendataan dan verifikasi rumah korban bencana												
2	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah Sederhana Sehat/Relokasi Program Pemerintah												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN SOSIALISASI STANDAR TEKNIS PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KEPADA MASYARAKAT/SUKARELAWAN TANGGAP BENCANA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Perumahan / Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Program	:	Pengembangan Perumahan
Kegiatan	:	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase rumah layak huni yang disediakan; Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	200 orang
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 2. Tahapan penerapan SPM Perumahan Rakyat, yaitu: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan pemenuhan pelayanan dasar; d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Kondisi eksisting perumahan di Jawa Tengah: a. jumlah Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 1.390.825 unit (berdasarkan Basis Data Terpadu); b. jumlah backlog (kekurangan rumah) mencapai 406.329 unit; c. Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana; d. kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan rumah. 4. Salah satu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana. Kegiatan ini dilaksanakan dengan sosialisasi kepada OPD dan/atau masyarakat calon penerima bantuan untuk pelaksanaan

Dipindai dengan CamScanner

		Intervensi program dari APBD Provinsi, yaitu Peningkatan Kualitas RTLH, Rehabilitasi Rumah Masyarakat Korban Bencana, Pembangunan Baru/ Relokasi Rumah Masyarakat Korban Bencana, dan Pembangunan Baru Akibat Relokasi Program Pemerintah Provinsi. 5. Melalul kegiatan sosialisasi diharapkan program penyediaan dan rehabilitasi rumah oleh pemerintah provinsi dapat disebarluaskan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
E. Lingkup kegiatan	:	Maksud: Memberikan sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Tujuan: Tersampaikannya informasi terkait Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dengan target sejumlah 200 orang peserta sosialisasi.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	-
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	-
3. Koordinasi	:	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	:	Sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	- ATK; - Dekorasi dan dokumentasi; - Penggandaan/percetakan; - Ruang rapat; - Konsumsi rapat; - Mobil operasional/sewa.
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2024 : Rp 100.000.000,- Th 2025 : Rp 70.000.000,- Th 2026 : Rp 200.000.000,-
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		

Semarang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan

SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi kepada OPD Kabupaten/Kota												
2	Sosialisasi kepada masyarakat												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA
SUB KEGIATAN SOSIALISASI PENGEMBANGAN PERUMAHAN BARU DAN MEKANISME AKSES PERUMAHAN KPR-FLPP
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Perumahan / Seksi Perencanaan Teknis dan Pembiayaan Perumahan
Program	:	Pengembangan Perumahan
Kegiatan	:	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase rumah layak huni yang disediakan; Persentase rumah tidak layak huni yang tertangani.
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	300 orang
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. Jenis pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat berdasarkan Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal: a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi. 2. Tahapan penerapan SPM Perumahan Rakyat, yaitu: a) pengumpulan data; b) penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c) penyusunan pemenuhan pelayanan dasar; d) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. 3. Kondisi eksisting perumahan di Jawa Tengah: a. jumlah Rumah Tidak Layak Huni sejumlah 1.390.825 unit (berdasarkan Basis Data Terpadu); b. jumlah backlog (kekurangan rumah) mencapai 406.329 unit; c. Jawa Tengah merupakan daerah rawan bencana; d. kejadian bencana yang menyebabkan kerusakan rumah. 4. Salah satu urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman adalah Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP. Kegiatan ini dilaksanakan dengan Sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pembiayaan perumahan bersubsidi.

Dipindai dengan CamScanner

		5. Melalui kegiatan sosialisasi diharapkan program pembiayaan perumahan bersubsidi dapat disebarluaskan ke masyarakat dan dapat dimanfaatkan secara tepat sasaran.
E. Lingkup kegiatan	:	Maksud: Memberikan sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan kepada masyarakat dan stakeholder terkait. Tujuan: Tersampaikannya informasi terkait Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan dengan target sejumlah 300 orang peserta sosialisasi.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	- 1 (satu) orang D3 Tenaga Teknis selama 12 (dua belas) bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	-
3. Koordinasi	:	Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa di Jawa Tengah
4. Tinjauan lapang	:	Sosialisasi kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	- ATK; - Dekorasi dan dokumentasi; - Penggandaan/percetakan; - Ruang rapat; - Konsumsi rapat; - Mobil operasional/sewa.
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2024 : Rp 80.000.000,- Th 2025 : Rp 70.000.000,- Th 2026 : Rp 120.000.000,-
H. Penutup	:	Sub Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		

Semarang, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Perumahan

SRI WIHARNANTO, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi pembiayaan perumahan bersubsidi kepada masyarakat												

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl. Madukoro Blok AA – BB Kompleks PRPP Semarang
Telp. (024) 7608435 Fax (024) 7608202

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
Dinas	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Program	:	1.04.02 Program Pengembangan Perumahan
A. Kegiatan	:	1.04.02.1.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
Sub kegiatan	:	1. Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana 2. Pembangunan Rumah Bagi Korban Bencana
Dukungan terhadap indikator Program	:	- Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi - Jumlah unit rumah yang dibangun
B. Sasaran kegiatan	:	1. Rehabilitasi atau Peningkatan Kualitas (PK) Bagi Rumah Korban Bencana dengan tingkat kerusakan sedang sehingga menjadi rumah yang layak huni (PK Bencana); 2. Rekonstruksi / Relokasi atau Pembangunan Baru (PB) Bagi Rumah Korban Bencana dengan tingkat kerusakan berat/roboh sehingga menjadi rumah yang layak huni (PB Bencana); 3. Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah sehingga memiliki rumah yang layak huni (PB Relokasi); 4. Pembangunan Rumah bagi masyarakat yang belum memiliki rumah (PB Backlog).
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	a. 150 Unit Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) b. 20 Unit Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) c. 100 Unit Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi) d. 240 Unit Pembangunan Rumah Penanganan Backlog Pemerintah (PB Backlog)
2. Lokasi	:	a. 14 Desa dalam 5 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana) b. 8 Desa dalam 3 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana) c. 18 Desa dalam 8 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi) d. 28 Desa dalam 7 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah untuk Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Backlog)
D. Latar Belakang	:	**1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana)**

- Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan ringan/sedang. Untuk rumah terdampak bencana yang mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan sedang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan kepada masyarakat miskin yang telah terdaftar di DTKS dan terdampak bencana hingga rumah mengalami kerusakan sedang, masing-masing Penerima Bantuan senilai **Rp 20.000.000,-** (Dua Puluh Juta Rupiah) untuk digunakan dalam proses pelaksanaan perbaikan rumah menuju layak huni.

2. **Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana)**
   - Terdapat berbagai bencana yang terjadi di Jawa Tengah sehingga menyebabkan kerusakan rumah dengan tingkat kerusakan berat hingga roboh. Beberapa rumah masyarakat juga berada di area rawan bencana sehingga perlu direlokasi ke area yang lebih aman dari bencana.
     Untuk hunian yang dibangun total karena rusak berat atau pindah karena berada di lokasi rawan bencana, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan kepada masyarakat miskin yang telah terdaftar di DTKS dan terdampak bencana hingga rumah mengalami kerusakan berat/roboh atau berada di area rawan bencana, masing-masing menerima senilai **Rp 50.000.000,-** (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk digunakan dalam proses pelaksanaan pembangunan baru di lahan milik sendiri.

3. **Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi).**
   - Di wilayah Jawa Tengah masih banyak masyarakat yang belum menghuni di rumah hunian tetap milik sendiri. Beberapa diantaranya masih tinggal di Rumah Susun Sewa (Rusunawa), Rumah Liar (Ruli), dan beberapa menempati di lahan milik pemerintah ataupun di simpadan sungai. Oleh karena itu, Pemerintah wajib hadir untuk menyediakan hunian tetap.
     Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan kepada masyarakat miskin yang telah terdaftar di DTKS dan terdampak relokasi program pemerintah, masing-masing menerima senilai **Rp 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk rumah 1 lantai.
     Lahan yang dimaksud merupakan hasil pembelian secara mandiri maupun secara berkelompok dalam komunitas membeli hamparan tanah yang kemudian dibagi menjadi kavling-kavling.

4. **Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB Backlog)**
   - Jawa Tengah memiliki angka backlog (kekurangan rumah) yang cukup tinggi, mencapai 324.855 unit (baseline Backlog pada status Desember 2023). Sehingga dengan kondisi tersebut memerlukan adanya bantuan yang diberikan untuk penyediaan rumah layak

		huni utamanya kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah yang telah terdaftar di DTKS, masing-masing menerima senilai **Rp 40.000.000,-** (Empat Puluh Juta Rupiah) untuk rumah 1 lantai. Lahan yang dimaksud merupakan hasil pembelian secara mandiri maupun secara berkelompok dalam komunitas membeli hamparan tanah yang kemudian dibagi menjadi kavling-kavling.
E. Lingkup Kegiatan	:	**Maksud dan Tujuan** **1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana)** • ***Maksud :*** - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan sedang melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. • ***Tujuan :*** - Agar masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak bencana dapat memperbaiki kembali rumahnya yang rusak sehingga menjadi rumah yang layak huni. **2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana)** • ***Maksud :*** - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak bencana khususnya yang mengalami tingkat kerusakan berat/roboh atau berada di lokasi rawan bencana melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. • ***Tujuan :*** - Agar masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS dan terdampak bencana dapat membangun kembali rumahnya yang rusak berat menjadi rumah yang layak huni atau membangun di lokasi baru yang tidak rawan bencana. **3. Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi)** • ***Maksud :*** - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terdampak relokasi program pemerintah melalui bantuan sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan. • ***Tujuan :*** - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang terkena relokasi program provinsi untuk mendapatkan rumah yang layak huni. **4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB Backlog)** • ***Maksud :*** - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah melalui bantuan

sosial berupa bantuan stimulan material bahan bangunan.

- ***Tujuan :***
  - Memberikan bantuan stimulan kepada masyarakat miskin yang belum memiliki rumah untuk mendapatkan rumah yang layak huni.

Mekanisme / Metode Pelaksanaan

1. **Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana)**
   Mekanisme & Metode pelaksanaan :
   - Bantuan Sosial (Bansos) stimulan material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.
   - Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan (KPM).
   - Proses perbaikan rumah dikerjakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan
2. **Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana)**
   Mekanisme & Metode pelaksanaan :
   - Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat miskin yang terdaftar dalam DTKS berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.
   - Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan (KPM).
   - Proses pembangunan rumah dikerjakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.
3. **Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi)**
   Mekanisme & Metode pelaksanaan :
   - Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat miskin yang masuk ke DTKS berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.
   - Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan (KPM).
   - Proses pembangunan rumah dikerjakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.
4. **Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB Backlog)**
   Mekanisme & Metode pelaksanaan :

- Bantuan Sosial (Bansos) material bahan bangunan diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Disperakim Provinsi kepada masyarakat miskin yang masuk ke DTKS berdasarkan proposal yang telah diajukan oleh Kabupaten/Kota dan telah diverivali kelengkapan dan kebenaran datanya.
- Pengadaan material bansos dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang beranggotakan Kelompok Penerima Bantuan (KPM).
- Proses pembangunan rumah dikerjakan secara swadaya oleh Penerima Bantuan.

Kebutuhan Waktu

1. **Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana)**
   - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material beserta monitoring selama 3 (tiga) bulan. Pelaksanaan perbaikan rumah beserta monitoring selama 3 (tiga) bulan.
2. **Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana)**
   - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta monitoring selama 5 (lima) bulan.
3. **Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi)**
   - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta monitoring selama 5 (lima) bulan.
4. **Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB Backlog)**
   - Persiapan pelaksanaan membutuhkan waktu sekitar 2 (dua) bulan, pelaksanaan penyerahan bantuan material beserta monitoring selama 5 (lima) bulan. Pelaksanaan pembangunan rumah beserta monitoring selama 5 (lima) bulan.

Keterlibatan

1. Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (PK Bencana)
   Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, BPBD Kabupaten, OPD Kabupaten yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Barang.
2. Pembangunan Rumah Korban Bencana (PB Bencana)
   Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, BPBD Kabupaten, OPD Kabupaten yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Barang.
3. Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi)

Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, OPD Kabupaten yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Barang.

4. Pembangunan Rumah Penanganan Backlog (PB Backlog)
   Kegiatan ini melibatkan Penerima Bantuan secara aktif, Kelompok Masyarakat, Perangkat Desa, OPD Kabupaten yang menangani bidang perumahan, Disperakim Provinsi Jawa Tengah, dan Penyedia Barang.

F. Komponen kegiatan

- **Kebutuhan Operasional Kegiatan**

1. Kebutuhan Belanja Pegawai	:	1. Panitia Pengelola Kontrak Swakelola • Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (14 Desa dalam 5 Kabupaten lokasi Rehabilitasi) • Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (8 Desa dalam 3 Kabupaten Kabupaten lokasi Pembangunan) • Membutuhkan 3 (tiga) orang Pengelola Kontrak Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (18 Desa dalam 8 Kabupaten lokasi Relokasi) • Membutuhkan 5 (lima) orang Pengelola Kontrak Swakelola untuk masing-masing lokasi pekerjaan (pada 28 Desa dalam 7 Kabupaten/ Kota lokasi PB Backlog) 2. Tenaga Fasilitator Lapangan 1. Membutuhkan 1 (satu) orang Tenaga Fasilitator yang berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 6 bulan yang akan bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola dengan anggaran total Rp 24.126.000,- pada kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana (PB Bencana), 2. Membtuhkan 3 (tiga) orang Tenaga Fasilitator yang berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 7 bulan yang akan bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola dengan anggaran total Rp 84.441.000,- pada kegiatan Pembangunan Rumah Relokasi Program Pemerintah (PB Relokasi) 3. Membutuhkan 9 (sembilan) orang Tenaga Fasilitator yang berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 8 bulan dan 1 (satu) orang Koordinator Tenaga Fasilitator yang berasal dari unsur profesional (pendidikan minimal S1/setara) dalam jangka waktu 11 bulan yang akan bekerja membantu sisi administrasi bansos swakelola dengan anggaran total Rp 261.365.000,- pada kegiatan pembangunan baru penanganan backlog.
2. Koordinasi	:	Diperlukan koordinasi dengan beberapa instansi lain, yakni: 1. Kementrian PUPR Penyediaan Perumahan untuk koordinasi dan sinkronisasi kegiatan; 2. BAPPEDA Provinsi untuk sinkronisasi kegiatan dan target pencapaian; 3. BPBD Provinsi untuk koordinasi dan rekomendasi wilayah yang mengalami bencana;

		4. Dinas yang menangani perumahan di Kabupaten / Kota untuk melakukan sosialisasi calon penerima bantuan sosial; 5. BPBD Kabupaten / Kota untuk sumber data sekunder rumah terdampak bencana dan verifikasi-validasi terhadap calon penerima bantuan sosial, 6. Perangkat Desa untuk melakukan sosialisasi dan verifikasi-validasi calon penerima bantuan sosial.
3. Tinjauan lapangan	:	Kegiatan verifikasi dan validasi calon penerima untuk memastikan bahwa mereka layak mendapatkan bantuan sosial sehingga tepat sasaran. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan calon penerima bantuan pada tahun anggaran berikutnya. Kegiatan sosialisasi kepada pemberian bantuan sosial kepada masyarakat calon penerima. Kegiatan ini melibatkan stakeholder/OPD pemangku kepentingan terkait, Perangkat Desa, Pokmas, dan masyarakat secara langsung guna menyamakan persepsi dan data. Kegiatan ini dilakukan pada awal tahapan pemberian bantuan. Setelah pelaksanaan kegiatan sosialisasi, dilakukan survey harga bahan material di daerah setempat guna menyusun HPS untuk pembelian material.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, diperlukan peralatan sebagai berikut: 1. Alat tulis kantor (mis. kertas, stofmap, tinta printer, ballpoint, staples, dll) 2. Peralatan komputer dan alat cetak 3. Kendaraan dinas (mobil) 4. Peralatan safety (sepatu boot, kaos tangan, jas hujan, rompi, dll)
G. Anggaran	:	*Th 2025 : Rp 19.430.000.000,- (Sembilan Belas Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)*
H. Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
I. Penutup	:	Demikian Kerangka Acuan Kerja ini kami buat untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2025.

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Perumahan



Sri Wiharnanto, ST, MT
NIP. 19670207 199003 1 00

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PENDISTRIBUSIAN DAN SERAH TERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	**Perumahan/ Perumahan Swadaya**
Program	:	Pengembangan Perumahan
Kegiatan	:	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi
Dukungan terhadap indikator Program	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembagian Rumah kepada Korban Bencana Provinsi atau yang Terkena Relokasi Program Provinsi
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Laporan jumlah unit RTLH yang telah direhabilitasi/ ditingkatkan kualitasnya (Bankeupemdes RTLH)
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1 Laporan
1. Lokasi	:	35 Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 129 huruf a bahwa dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, setiap orang berhak menempati, menikmati, dan/atau memiliki/memperoleh rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur. Sehubungan dengan hal tersebut, maka membawa implikasi pada kebijakan sosial bahwa penanggulangan kemiskinan memerlukan langkah-langkah secara simultan, antara pengembangan usaha ekonomi, bimbingan sosial, dan pemenuhan rumah layak huni. Selain itu arah kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Tengah saat ini, yaitu terwujudnya Jawa Tengah yang mandiri, maju, sejahtera, dan lestari dengan visi menuju Jawa Tengah sejahtera dan berdikari dengan salah satu sasaran adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan perumahan layak huni. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah pada pada kondisi eksisting yang terjadi di Jawa Tengah, yaitu jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang masih tinggi hingga mencapai 1.000.309 unit (Baseline RTLH pada status Desember 2023, berdasarkan Basis Data Terpadu). Sehingga tentunya kondisi tersebut memerlukan adanya bantuan yang diberikan untuk penyediaan rumah layak huni.
E. Lingkup kegiatan	:	- Maksud: Melaporkan penyediaan jumlah unit rumah layak huni bagi masyarakat miskin melalui rehabilitasi/ Peningkatan kualitas

		- Tujuan kegiatan: Pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi/ Peningkatan kualitas
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	Bankeupemdes RTLH 1. Tenaga Pendukung Kegiatan : 7 (tujuh) orang (S1) tenaga teknis selama 12 (sebelas) bulan 2. Tenaga Pendukung Kegiatan/ : 1 (satu) orang tenaga administrasi (SMA sederajat) selama 12 (dua belas) bulan. 3. Tenaga Fasilitator Lapangan : 1 (tiga puluh) orang (S1) coordinator tenaga teknis di lapangan selama 11 (sebelas) bulan dan 29 (dua puluh sembilan) orang (S1) tenaga teknis di lapangan selama 8 (delapan) bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	Tenaga Ahli IT (Informasi dan Teknologi) sebanyak 1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan yang bertujuan untuk ***updating*** dan sebanyak 1 (satu) orang selama 5 (lima) bulan yang bertujuan untuk ***maintenance*** fungsi Sistem Informasi Perumahan agar dapat terjangkau hingga tataran Desa/ Kelurahan; Output yang dihasilkan: Validasi dan Updating data RTLH dan Kebutuhan Rumah melalui Sistem Informasi Perumahan (SIMPERUM)
3. Koordinasi	:	Pelaksaanaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa terdiri dari kegiatan 1. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi Teknis terkait Mekanisme Penyaluran Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni, Validasi Data RTLH sekaligus Inputting Rencana Kegiatan dalam aplikasi SIMPERUM dan Penyusunan Berkas Penyaluran Bantuan dan Laporan Pertanggungjawaban kepada OPD Kabupaten dan Pemerintah Desa 2. Pelaksanaan Pendampingan selama kegiatan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa termasuk di dalamnya pendampingan kepada OPD Kabupaten dalam pengusulan calon penerima hingga penyusunan dan upload berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran, verifikasi berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran, rekomendasi penyaluran dana bantuan, pendampingan penyusunan dan upload berkas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, dan sampling monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan
4. Tinjauan lapangan	:	1. Koordinasi untuk pelaksanaan Bimtek di 29 Kabupaten/Kota 2. Pendampingan Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Kegiatan termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi di 35 Kabupaten/Kota
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	1. ATK untuk dukungan administrasi kantor 2. Komputer untuk dukungan terhadap pengaplikasian Sistem Informasi 3. Sewa kendaraan/ mobil untuk dukungan operasional lapangan 4. Penggandaan dan dekorasi/dokumentasi 5. Konsumsi rapat
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2025 : 5.500.000.000,-* *Th 2026 : 2.550.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	*Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi* dilaksanakan oleh Bidang Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sebagai Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Bidang Perumahan

Semarang, 2 Januari 2025

Disusun Oleh:	Diketahui Oleh:
Subkoordinator Perumahan Swadaya	Kepala Bidang Perumahan
Maharani Tri Hapsari, ST, MT	**Sri Wiharnanto, ST, MT**
NIP. 19831031 201001 2 014	NIP. 19670207 199003 1 005

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
	Jumlah unit rumah masyarakat miskin yang direhabilitasi (Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni)												
1	Sub-Sub Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni												
a	Persiapan penyusunan dan pengajuan SK penerima bantuan dan Rapat Koordinasi Teknis Pelaksanaan Bankeupemdes PK RTLH												
b	Bimbingan teknis penyusunan dan upload berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran												
c	Verifikasi berkas proposal/ RK dan berkas penyaluran												
d	Pendampingan penyusunan dan upload berkas laporan pertanggungjawaban kegiatan												
e	Monitoring dan evaluasi												
2	Sub-Sub Kegiatan Pelaksanaan Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM												
a	Persiapan dan pelaksanaan pengadaan jasa konsultansi												
b	Koordinasi updating dan maintenance aplikasi dan pelaksanaan kontrak jasa konsultansi												
c	Rapat laporan pelaksanaan, antara dan akhir												

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KOORDINASI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**
Program	:	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
A. Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase PSU yang disediakan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
B. Sasaran Sub kegiatan	:	35 Kab/Kota
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1. Laporan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 2. Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki urusan pemerintahan Sub Urusan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) berupa penyelengaraan PSU permukiman. Prasarana kawasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana kawasan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

		Perumahan dan kawasan permukiman merupakan aspek fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
E. Lingkup kegiatan	:	• Maksud dan Tujuan kegiatan: Maksud dari kegiatan ini adalah - terlaksananya koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman melalui kegiatan serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota - terlaksanananya Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Tujuan dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan urusan PSU kawasan permukiman di Jawa Tengah. • Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan : Swakelola • Kebutuhan Waktu : 12 Bulan • Siapa yang terlibat : Pemerintah Kab/kota, SKPD di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pengembang di Jawa Tengah, Kelompok masyarakat.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	• 1 orang tenaga teknis (staf teknis Non PNS) Tingkat Pendidikan D4 selama 12 bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	• Narasumber daerah
3. Koordinasi	:	– rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan; – tujuan koordinasi yang dilakukan; – pihak yang terlibat dalam koordinasi; a) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Serah terima PSU b) Koordinasi dengan Disperakim Kabupaten/ Kota dalam rangka ➢ Rapat Koordinasi serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota c) Koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah ➢ Rapat Koordinasi serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota d) Koordinasi dengan asosiasi pengembang ➢ Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PSU Permukiman – frekuensi kebutuhan dan waktu. 12 bulan

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KOORDINASI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**
Program	:	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
A. Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase PSU yang disediakan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
B. Sasaran Sub kegiatan	:	35 Kab/Kota
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1. Laporan Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman 2. Laporan Perkembangan Penyerahan PSU Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan
2. Lokasi	:	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	Sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah Provinsi memiliki urusan pemerintahan Sub Urusan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum (PSU) berupa penyelengaraan PSU permukiman. Prasarana kawasan adalah kelengkapan dasar fisik kawasan yang memungkinkan lingkungan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sarana kawasan adalah fasilitas penunjang, yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Utilitas umum adalah sarana penunjang untuk pelayanan kawasan, yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan dan professional agar dapat memberikan pelayanan memadai kepada masyarakat.

Dipindai dengan CamScanner

		Perumahan dan kawasan permukiman merupakan aspek fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan yang sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
E. Lingkup kegiatan	:	• Maksud dan Tujuan kegiatan: Maksud dari kegiatan ini adalah - terlaksananya koordinasi penyelenggaraan PSU permukiman melalui kegiatan serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota - terlaksanananya Monitoring Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Tujuan dari kegiatan ini adalah penyelenggaraan urusan PSU kawasan permukiman di Jawa Tengah. • Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan : Swakelola • Kebutuhan Waktu : 12 Bulan • Siapa yang terlibat : Pemerintah Kab/kota, SKPD di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Pusat, dan Pengembang di Jawa Tengah, Kelompok masyarakat.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	• 1 orang tenaga teknis (staf teknis Non PNS) Tingkat Pendidikan D4 selama 12 bulan
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	• Narasumber daerah
3. Koordinasi	:	– rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan; – tujuan koordinasi yang dilakukan; – pihak yang terlibat dalam koordinasi; a) Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam Serah terima PSU b) Koordinasi dengan Disperakim Kabupaten/ Kota dalam rangka ➢ Rapat Koordinasi serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota c) Koordinasi dengan instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah ➢ Rapat Koordinasi serah terima PSU kawasan permukiman dari pengembang kepada Kabupaten/Kota d) Koordinasi dengan asosiasi pengembang ➢ Rapat Koordinasi Penyelenggaraan PSU Permukiman – frekuensi kebutuhan dan waktu. 12 bulan

Dipindai dengan CamScanner

4. Tinjauan lapang	:	– Rencana dan tujuan tinjauan lapangan; ➢ Tinjauan lapangan ke lokasi serah terima PSU dari pengembang kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ➢ Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan PSU Permukiman – Pihak yang terlibat ➢ Pemerintah Kab/Kota ➢ Instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah ➢ Pengembang
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024 : 105.000.000,-* *Th 2025 : 80.000.000,-* *Th 2026 : 160.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

EFFENDY JUDY ARIANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB-SUBKEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	SSK - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PSU Permukiman Provinsi Jawa Tengah												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMAN
UNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERMUKIMAN
SUB KOORDINASI PENGEMBANGAN PSU KAWASAN PERMUKIMAN
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng**
Program	:	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
Kegiatan	:	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
A. Sub Kegiatan	:	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase PSU yang disediakan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		Jumlah Lokasi Permukiman yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman
B. Sasaran Sub kegiatan	:	35 Kab/Kota
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1 lokasi
2. Lokasi	:	Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar
D. Latar belakang	:	Sesuai amanat Undang-Undang No.1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menjelaskan bahwa upaya pemenuhan rumah yang layak huni dalam sebuah perumahan perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum, sehingga Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan dan ekonomis. Salah satu upaya pemenuhan kebutuhan rumah layak adalah melalui Program Pembangunan Rumah Baru (PB) dengan target sasaran penerima manfaat diantaranya adalah anggota komunitas/kelompok/masyarakat yang terkena dampak program pemerintah yang permukimannya membutuhkan PSU. Bedasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Kawasan Permukiman melakukan Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman dalam rangka pencegahan

Dipindai dengan CamScanner

		kawasan permukiman kumuh dengan menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada yang menunjang fungsi permukiman untuk dapat menjadikan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum yang layak huni.
E. Lingkup kegiatan	:	a. Maksud dan Tujuan kegiatan; Maksud dari kegiatan ini adalah - terlaksananannya koordinasi dan pendampingan Penyediaan PSU Permukiman - tersedianya dokumen perencanaan/DED penyediaan PSU Permukiman - tersedianya PSU Kawasan Permukiman melalui hibah b. Tujuan dari kegiatan ini adalah penyediaan PSU perumahan dan permukiman yang layak huni c. Permasalahan Masih kurangnya jumlah dan kualitas prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU) di lingkungan permukiman. d. Hasil/Outcome Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Permukiman e. Dampak/Impact Penyediaan PSU yang layak di lingkungan permukiman f. Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan: Swakelola Kontraktual g. Kebutuhan Waktu: 12 Bulan h. Siapa yang terlibat : Pemerintah Kab/kota, SKPD di Provinsi Jawa Tengah, dan Kelompok masyarakat.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	1 orang tenaga teknis (staf teknis Non PNS) Tingkat Pendidikan S1 selama 12 bulan • Narasumber dari Pemeritah Kab/kota • Moderator dari Pemerintah Desa
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	• Konsultan Penyusunan DED/Perencanaan • Konsultan Pengawasan/Supervisi
3. Koordinasi	:	– rencana koordinasi yang diperlukan dalam kegiatan; – tujuan koordinasi yang dilakukan; – pihak yang terlibat dalam koordinasi: a) Koordinasi dengan dalam rangka penyediaan PSU permukiman b) Koordinasi dengan Disperakim, Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa, Kelompok Mayarakat dan Instansi terkait di Provinsi Jawa Tengah – frekuensi kebutuhan dan waktu. 12 bulan

Dipindai dengan CamScanner

4. Tinjauan lapang	:	– Rencana dan Tujuan tinjauan lapangan; ➢ Tinjauan lapangan ke lokasi penyediaan PSU Perumahan atau permukiman kepada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah ➢ Tinjauan lapangan Pendampingan Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Permukiman – Pihak yang terlibat ➢ Pemerintah Kabupaten/Kota ➢ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ➢ Kelompok masyarakat	
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:		
2. Pengadaan tanah/ lahan	:		
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: 1.470.411.000,-* *: 400.000.000,-* *: 1.400.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:		

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

EFFENDY JUDY ARIANTO, S.T., M.T.
Pembina Tk. I
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN
KEGIATAN URUSAN PENYELENGGARAN PSU PERMUKIMAN
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM DI PERMUKIMANUNTUK MENUNJANG FUNGSI PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	SSK - Koordinasi dan Pendampingan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman												
2.	SSK - Perencanaan dan Pengawasan Penyedian Prasarana dan Sarana Permukiman												
3.	SSK - Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/ PEREMAJAAN/ PEMUKIMAN KEMBALI PERMUKIMAN KUMUH DAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI UNTUK PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Kawasan Permukiman/ Sub Koordinasi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (Lima Belas) Ha
Dukungan terhadap indikator Program	:	Melaksanakan Kegiatan Kawasan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		1. Melaksanakan Pemantauan Kawasan Kumuh Kab/Kota. 2. Melaksanakan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota 3. Melaksanakan Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan Permukiman 4. Melaksanakan Survei dan Pendataan Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah 5. Melaksanakan Pemeliharaan Sistem Informasi Kawasan Permukiman
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	3 Laporan a. Laporan perkembangan kawasan permukiman kumuh ditahun berjalan

Dipindai dengan CamScanner

		b. Laporan hasil verifikasi kawasan permukiman kumuh c. Laporan koordinasi lokasi verivali hibah
2. Lokasi	:	a. Jumlah Kab/ kota : 35 Kab/Kota b. Jumlah Kecamatan/ Desa : -
D. Latar belakang	:	Sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sub Urusan Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. Berdasarkan PP No.12 tahun 2021 tentang Penyelenggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pengendalian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah suatu proses untuk mewujudkan tertib Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang dilaksanakan pada tahap perencanaan, pembangunan, dan pemanfaatan. Bentuk kegiatan tersebut dilaksanakan melalui Pemantauan Kawasan Kumuh, Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota, Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan Permukiman, Survei dan Pendataan Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah dan Pemeliharaan Sistem Informasi Kawasan Permukiman.
E. Lingkup kegiatan	:	– Maksud dan Tujuan kegiatan; Untuk mewujudkan tercapainya perencanaan dan pengendalian kawasan permukiman; – Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan berupa swakelola dan Kontraktual; – Kebutuhan Waktu 12 bulan; Melibatkan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	- Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan output (tenaga teknis) yakni 2 orang selama 12 bulan (S1)
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Sub Kegiatan Jasa Konsultansi memerlukan perencanaan dan kajian yang mendalam sehingga diperlukan dukungan tenaga ahli dalam paket Jasa Konsultansi.
3. Koordinasi	:	– Koordinasi akan dilaksanakan kepada 35 Kab/Kota guna mendapatkan data dan gambaran kawasan permukiman kumuh.

Dipindai dengan CamScanner

4. Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan akan dilakukan dalam rangka Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh dan Validasi Teknis Usulan Hibah; – Pihak yang terlibat yakni Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Vertikal.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *: Rp. 269.718.000,-* *Th 2025* *: Rp. 690.000.000,-* *Th 2026* *: Rp. 300.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	

Semarang, 2 Januari 2025
Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Disperakim
Provinsi Jawa Tengah

Effendy Judy Arianto, ST. MT.
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Pemantauan Kawasan Kumuh												
2	Sub-Sub Kegiatan Verifikasi SK Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kab/Kota												
3	Sub-Sub Kegiatan Validasi Teknis Usulan Hibah Kawasan Permukiman												
4	Sub-Sub Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Kawasan Permukiman												
5	Sub-Sub Kegiatan Survei dan Pendataan Kondisi Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Jawa Tengah												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PENYADARAN PUBLIK PENCEGAHAN TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Kawasan Permukiman/ Sub Koordinasi Perencanaan Teknis Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub Kegiatan	:	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
Dukungan terhadap indikator Program	:	Melaksanakan kegiatan-kegiatan Kawasan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		Penyelenggaraan Pelatihan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh.
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Jumlah Laporan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	3 Laporan a. Laporan perencanaan penyadaran publik pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh b. Laporan koordinasi penyadaran publik dalam pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh c. Laporan penguatan kapasitas masyarakat dalam pencegahan tumbuhnya kawasan permukiman kumuh
	:	a. Jumlah Kab/ kota : 35 Kab/Kota b. Jumlah Kecamatan/ Desa : -
D. Latar belakang	:	Sesuai UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pembagian Urusan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Provinsi memiliki Sub Urusan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha. Berdasarkan Permen PUPR no 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu dilaksanakan pembimbingan dalam bentuk kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktifitas tertentu terkait Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Dipindai dengan CamScanner

		Bentuk kegiatan tersebut diatas dilaksanakan melalui Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh melalui Pelatihan kepada masyarakat guna mencegah tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
E. Lingkup kegiatan	:	– Maksud dan Tujuan kegiatan Untuk mewujudkan tercapainya Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh; – Mekanisme/ metode pelaksanaan kegiatan berupa swakelola; – Kebutuhan Waktu 12 bulan; Melibatkan Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah;
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	-
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh melalui Pelatihan kepada masyarakat mengundang narasumber dari Akademisi, Praktisi dan Instansi Vertikal.
3. Koordinasi	:	– Koordinasi akan dilaksanakan kepada 35 Kab/Kota guna mendapatkan Rencana Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh. – Koordinasi juga akan dilaksanakan secara vertikal kepada Pemerintah Pusat terkait adanya kebijakan-kebijakan baru Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
4. Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan akan dilakukan dalam rangka Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh; – Pihak yang terlibat yakni Pemerintah Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Instansi Vertikal.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024 : Rp. 85.000.000,-* *Th 2025 : Rp. 75.000.000,-* *Th 2026 : Rp. 150.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	

Semarang, 2 Januari 2025
Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman
Disperakim
Provinsi Jawa Tengah

Effendy Judy Arianto, ST. MT.
NIP. 19700225 199703 1 003

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub-Sub Kegiatan Pelatihan Kepada Masyarakat Guna Mencegah Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PELAKSANAAN PEMUGARAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/seksi	:	Bidang Kawasan Permukiman/ Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator program	:	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh yang tertangani
Dukungan terhadap indikator kegiatan		Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas
B. Sasaran sub kegiatan	:	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
C. Output sub kegiatan		
1. Satuan	:	Hektar (Ha)
2. Hektar (Ha)	:	50 hektar (Ha) kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang dilakukan peremajaan/pemugaran
D. Latar belakang	:	Permasalahan permukiman menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang dilakukan dari waktu ke waktu yang sebenarnya berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Penangananan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah terus dilaksanakan guna mewujudkan amanat Undang-Undang, namun dalam pelaksaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum adanya rencana penanganan yang komprehensif dimana penanganan kawasan permukiman seharusnya bersifat multisektoral dan melibatkan dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Berdasarkan permasalahan tersebut

		di atas maka perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi dalam penanganan kawasan permukiman baik dalam bentuk pencegahan maupun peningkatan kualitas kawasan. Pemerintah Provinsi dalam upaya penanganan kawasan permukiman kumuh melakukan intervensi/fasilitasi serta pendampingan guna mewujudkan penataan kawasan permukiman kumuh melalui Lomba Hari Habitat. Penanganan tersebut diharapkan dapat memberikan dampak dalam perbaikan lingkungan kumuh yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Jawa Tengah.
E. Lingkup kegiatan	:	– Maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah terselenggaranya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha melalui Lomba Hari Habitat – Tujuan dari kegiatan ini adalah tertanganinya kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah – Mekanisme/metode pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah kontrak – Kebutuhan waktu adalah 12 bulan – Yang terlibat dalam Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat
F. Komponen Kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan *output* terdiri dari: tenaga non PNS/tenaga pendukung kegiatan berjumlah berjumlah 1 orang selama 12 bulan
2. Dukungan tenaga ahli/pakar	:	– Narasumber/pembahas dan moderator dalam Sosialisasi Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat – Juri Lomba Hari Habitat 7 Orang terdiri dari akademisi, praktisi, asosiasi, pemerintah, forum PKP – Narasumber/pembahas dan moderator dalam sosialisasi DED/Perencanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2025
3. Koordinasi	:	– Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk: • Sosialisasi Lomba Hari Habitat; • Penyusunan DED/Perencanaan hadiah Lomba Hari Habitat • Pelaksanaan pembangunan fisik pemenang hadiah Lomba Hari Habitat; – Frekuensi kebutuhan dan waktu adalah 12 bulan
4. Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan dalam rangka: • Tinjauan lapangan nominasi pemenang Lomba Hari Habitat Tahun 2025 dalam rangka verifikasi penilaian lomba, • Tinjauan lapangan penyusunan DED/Perencanaan Lomba Hari Habitat Tahun 2025 • Tinjauan lapangan dalam rangka pelaksanaan fisik pemenang hadiah Lomba Hari Habitat Tahun 2025

		– Pihak yang terlibat • Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah • Instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah	
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/barang	:	-	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: 1.908.000.000,-* *: 1.900.000.000,-* *: 3.900.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:		

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Effendy Judy Arianto, S.T, M.T
NIP. 19700225 199703 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
DENGAN LUAS 10 - 15 HA DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA
TAHUN ANGGARAN 2025

	SUB-SUBKEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	SSK – Penyelenggaraan Lomba Hari Habitat												
2.	SSK – Perencanaan dan Pengawasan Pekerjaan Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana)												
3.	SSK – Pembangunan Hadiah Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Berupa Perbaikan dan Pembangunan Konstruksi Prasarana dan Sarana)												
4.	SSK – Koordinasi dan Pendampingan Pembangunan Hadiah Lomba Hari Habitat												

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/seksi	:	Bidang Kawasan Permukiman/Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator program	:	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh
Dukungan terhadap indikator kegiatan	:	Jumlah luas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 sampai dengan di bawah 15 Ha yang dilakukan peningkatan kualitas
B. Sasaran sub kegiatan	:	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
C. Output sub kegiatan		
1. Satuan	:	Unit rumah
2. Unit rumah	:	584 unit rumah di kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha
D. Latar belakang	:	Permasalahan permukiman menjadi salah satu isu utama pembangunan perkotaan yang cukup menjadi polemik, karena upaya penanganan yang dilakukan dari waktu ke waktu yang sebenarnya berbanding lurus dengan terus berkembangnya kawasan permukiman kumuh dan munculnya kawasan-kawasan kumuh baru. Penangananan kawasan permukiman kumuh di Provinsi Jawa Tengah terus dilaksanakan guna mewujudkan amanat Undang-Undang, namun dalam pelaksaannya terdapat beberapa permasalahan di antaranya belum adanya rencana penanganan yang komprehensif dimana penanganan kawasan permukiman seharusnya bersifat multisektoral dan melibatkan

		dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, masyarakat maupun swasta. Salah satu indikator penyebab kekumuhan adalah kondisi bangunan yang tidak memenuhi persyaratan kelayakan huni atau Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka perlu adanya kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dalam rangka peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.
E. Lingkup kegiatan	:	– Maksud dan tujuan Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah terselenggaranya perbaikan RTLH dalam kawasan permukiman dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha melalui verifikasi dan validasi, serta pembiayaan melalui Bankeupemdes. – Tujuan dari kegiatan ini adalah tertanganinya RTLH di kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah. – Mekanisme/metode pelaksanaan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah swakelola. – Kebutuhan waktu adalah 12 bulan. – Yang terlibat dalam Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, Pemerintah Desa, dan SKPD Provinsi Jawa Tengah.
F. Komponen Kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan *output* terdiri dari: tenaga non PNS/tenaga pendukung kegiatan berjumlah berjumlah 1 orang selama 12 bulan
2. Dukungan tenaga ahli/pakar	:	–
3. Koordinasi	:	– Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk: • Koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi RTLH di kawasan permukiman kumuh tahun 2025 dan tahun 2026. • Koordinasi dalam rangka pengusulan peningkatan kualitas RTLH melalui Bankeupemdes. • Pembaruan database RTLH di kawasan permukiman kumuh. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH di kawasan permukiman kumuh. – Frekuensi kebutuhan dan waktu adalah 12 bulan
4. Tinjauan lapangan	:	– Tinjauan lapangan dalam rangka: • Koordinasi dalam rangka verifikasi dan validasi RTLH di kawasan permukiman kumuh tahun 2025 dan tahun 2026. • Koordinasi dalam rangka pengusulan peningkatan kualitas RTLH melalui Bankeupemdes. • Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perbaikan RTLH di kawasan permukiman kumuh. – Pihak yang terlibat • Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. • Pemerintah Desa. • Pemerintah Kelurahan.

		• Instansi Pemerintah di Provinsi Jawa Tengah.	
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/dukungan alat/bahan/barang	:	-	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2024 Th 2025 Th 2026	: 100.000.000,- : 140.000.000,- : 130.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:		

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh:
Kepala Bidang Kawasan Permukiman

Effendy Judy Arianto, S.T, M.T
NIP. 19700225 199703 1 003

JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DALAM KAWASAN PERMUKIMAN
DENGAN LUAS 10 (SEPULUH) HA SAMPAI DENGAN DI BAWAH 15 (LIMA BELAS) HA
TAHUN ANGGARAN 2025

	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES
1.	SSK – Koordinasi dan Sinkronisasi Pendampingan Penanganan RTLH di Kawasan Permukiman Kumuh												

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN KEGIATAN TAHUN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 76084533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 - 7605202, 7608434
Laman http://jateng.prov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
Dinas	:	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Program	:	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
A. Kegiatan	:	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi
Sub kegiatan	:	Pemberitahuan, Pendataan Awal, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
Dukungan terhadap indikator Program	:	Prosentase Penyediaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
B. Sasaran kegiatan	:	1. Penyelenggaraan Persiapan Pengadaan Tanah di 35 Kabupaten/Kota; 2. Koordinasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan Berupa Zonasi Nilai Tanah; 3. Survei Pendahuluan Guna Penentuan Koordinat Lokasi Sampel Bidang Tanah; 4. Pengambilan Data Lapang atau Koordinat Titik Sampel Lokasi Bidang Tanah; 5. Desiminasi Fungsi Zonasi Nilai Tanah Sebagai Acuan Perencanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
C. Output kegiatan		
1. Satuan	:	Jumlah dokumen penyelenggaraan pengadaan tanah yang difasilitasi dan Zona Nilai Tanah (ZNT) sejumlah 5 Dokumen
2. Lokasi	:	a. Lokasi Fasilitasi Persiapan Pengadaan Tanah 35 Kab/Kota se Jawa Tengah; b. Lokasi Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan
D. Latar belakang	:	Pengadaan tanah di Indonesia untuk kebutuhan pembangunan semakin meningkat tanah sebagai tempat untuk bermukim maupun untuk kegiatan usaha. Masalah tanah adalah masalah yang menyangkut hak rakyat yang paling mendasar, disamping tanah mempunyai nilai ekonomis juga berfungsi sosial oleh karena itulah kepentingan perubahan atas tanah tersebut diterbarukan demi kepentingan umum ini dilakukan dengan pelepasan hak atas tanah dengan mendapatkan ganti kerugian yang tidak berupa uang semata akan tetapi juga berbentuk tanah dan fasilitas lain.

Dipindai dengan CamScanner

Hukum tanah nasional mengakui dan menghormati hak masyarakat atas tanah dan benda yang berkaitan atas tanah serta memberikan wewenang yang bersifat publik kepada negara berupa kewenangan untuk mengadakan pengaturan, membuat kebijakan, mengadakan pengelolaaan serta menyelenggarakan dan mengadakan pengawasan yang tertuang dalam pokok-pokok pengadaan tanah.

Permasalahannya adalah bagaimana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tersebut direncanakan, dipersiapkan, dilaksanakan, hingga penyerahan hasil pengadaan tanah berupa sertifikat hak atas tanah kepada pemerintah. Mengingat ada kepentingan yang saling berhadapan yaitu tuntutan ketersediaan tanah untuk pembangunan pada satu sisi dan kebutuhan masyarakat akan tanah untuk bermukim serta tempat beraktifitas mencari nafkah pada sisi yang lain.

Mekanisme pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan melalui proses pengadaan tanah dengan cara pelepasan atau penyerahan hak sesuai Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum bahwa, "Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Selanjutnya dijelaskan pula pada ayat (2), yaitu "Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil. Jadi diperlukan kesepahaman dan kesepakatan masyarakat tentang adanya suatu pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan tanah mereka. Untuk itu perlukan koordinasi dengan 35 kabupaten/kota ataupun dengan instansi vertikal yang membidangi pengadan tanah. Dalam penyelenggaraan tahapan pengadaan tanah khususnya pada tahapan persiapan pengadaan tanah maka dibutuhkan adanya Koordinasi dan Penyamaan Persepsi /sharing permasalahan penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dengan berbagai wilayah di Jawa Tengah.

Dipindai dengan CamScanner

		Dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah salah satu persyaratan yang harus dipenuhi adalah perkiraan nilai tanah dimana instansi yang memerlukan tanah menggunakan surat pernyataan dari camat setempat tentang transaksi 3 bulan terakhir. Untuk itu diperlukan adanya fasilitasi untuk menentukan perkiraan nilai tanah dengan menggunakan pendekatan Zonasi Nilai Tanah. Secara teknis fungsi kegunaan Zona Nilai Tanah tersebut menyajikan nilai – nilai tanah berdasarkan zona tertentu yang didapat dari hasil survey dilapangan. Zona Nilai Tanah tersebut berguna dalam menentukan tarif pelayanan pertanahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2010 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak. Disisi yang lain Zona Nilai Tanah yang ditetapkan selama ini masih memunculkan berbagai persoalan di pasar tanah salah satunya disebabkan oleh sampel yang digunakan terlalu sedikit, sehingga ke depan dengan adanya penambahan sample akan mendekati nilai tanah sesuai dengan kondisi tanah. Selanjutnya akan mengurangi kegelisahan sebagian masyarakat terkait dengan proses yang berhubungan perolehan hak atas tanah.
E. Lingkup kegiatan	:	**Pemberitahuan, Pendataan Awal, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum :** **1. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum** **Maksud :** Melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang meliputi : 1) Verifikasi Dokumen perencanaan pengadaan tanah; 2) Melaksanakan koordinasi di lokasi pembangunan sebagai langkah awal tahap persiapan pengadaan tanah; 3) Sosialisasi; 4) Pendataan Awal kepemilikan tanah; 5) Konsultasi Publik; 6) Konsultasi Publik Ulang; 7) Menerbitkan Penetapan Lokasi; 8) Mengumumkan Penetapan Lokasi.

Dipindai dengan CamScanner

Tujuan :

a. Terselenggaranya tahap persiapan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b. Memberikan jaminan kepastian hukum dengan terbitnya keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Penetapan Lokasi Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

2. Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan berupa Zonasi Nilai tanah

Maksud :

a. Untuk mengetahui harga tanah dalam suatu wilayah kawasan tertentu;
b. Untuk acuan perkiraan nilai tanah yang dapat dituangkan dalam dokumen perencanaan pengadaan tanah;
c. Untuk meningkatkan tertib administrasi berupa zonasi nilai tanah dalam suatu kawasan.

Tujuan :

a. Terwujudnya harga pasar tanah yang sesuai dengan aksessibilitas tanah;
b. Terkendalinya harga pasar tanah di masyarakat;
a. Terciptanya tertib administrasi pertanahan berupa zonasi nilai tanah guna kepentingan penyusunan dokumen penyelenggaraan pengadaan tanah;
b. Menyediakan informasi zona nilai tanah serta mengendalikan para spekulan tanah.

A. Mekanisme / metode pelaksanaan kegiatan

Mekanisme/metode pelaksanaan kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan secara swakelola

B. Kebutuhan Waktu Kegiatan

Kebutuhan Waktu kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025

C. Yang terlibat dalam kegiatan

Kegiatan Penetapan Lokasi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dengan berkoordinasi, berkonsultasi dan berkerjasama dengan :

Dipindai dengan CamScanner

		c. Meningkatkan pemahaman bagi pemerintah Kabupaten/Kota serta masyarakat terkait pentingnya Zona Nilai Tanah agar terwujudnya harga pasar tanah yang sesuai dengan aksessibilitas tanah; d. Meningkatkan pemahaman aparatur desa pentingnya pendokumentasian mutasi tanah. Pihak yang terlibat : 1. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Instansi terkait yang berkaitan dengan penyelenggaraan persiapan pengadaan tanah 2. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 3. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; 4. Pemerintah Kecamatan Desa/Kelurahan lokasi yang terlewati Pembangunan untuk kepentingan umum 5. Pemerintah Desa lokasi yang akan dilaksanakan Verifikasi dan Validasi alas hak dan mutasi tanah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	Maintanance Aplikasi Sikunang : Rp. 20.000.000,-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	Jelaskan dan Uraikan : - Tujuan/Kebutuhan Pengadaan Lahan : - - Mekanisme, Lokasi, dan kebutuhan luas lahan : -
G. Anggaran	:	Th 2025 : Rp. 380.000.000,-
H. Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
I. Penutup	:	Kerangka Acuan Kerja dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk dapat dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Semarang, 2 Januari 2025

KEPALA BIDANG PERTANAHAN

ILHAM PRIBADI,SH,MH
Penata Tingkat I
NIP. 19841201 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

		1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; 2. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah yang membidangi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; 4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah; 5. Instansi yang membutuhkan tanah; 6. Pemerintah Pusat.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	Kebutuhan belanja pegawai untuk dukungan output (tim teknis/ non teknis) : a. Honorarium Tenaga Keamanan/ Pengemudi/Tenaga Teknis dalam Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi : 1) Sub Kegiatan Pemberitahuan, Pendataan Awal, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum = 2 org x 12 bln x Rp. 4.021.000, = Rp 96.504.000,- b. Kebutuhan jumlah / waktunya : 1 (satu) tahun anggaran 2025
2. Koordinasi	:	a. Koordinasi dalam rangka langkah awal persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; b. Koordinasi dalam rangka penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerjasama tentang Kegiatan peningkatan tertib administrasi pertanahan berupa Zonasi Nilai Tanah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024; c. Koordinasi bertujuan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna serta tepat sasaran. **Frekuensi Kebutuhan dan Waktu :** 1 (satu) Tahun Anggaran 2025
3. Tinjauan lapang	:	**Rencana Tinjauan Lapangan pada tahun anggaran 2025** Tujuan : a. Menentukan langkah awal untuk pelaksanaan tahap persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; b. Menentukan status dan pemanfaatan bidang tanah yang terkena pembangunan untuk kepentingan umum;

Dipindai dengan CamScanner

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sub Sub Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum												
2	Sub Sub Kegiatan Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan berupa Zonasi Nilai Tanah.												
3	Sub Sub Kegiatan												
4	Sub Sub Kegiatan												
5	Sub Sub Kegiatan												

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN
SUB KEGIATAN INVENTARISASI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA PERTANAHAN DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Program	:	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
A. **Kegiatan**	:	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Sub kegiatan	:	Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Dukungan terhadap indikator Program	:	Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan.
B. **Sasaran kegiatan**	:	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan reforma agraria
C. **Output kegiatan**		1. Jumlah data sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 2. Jumlah data permasalahan penataan aset reforma agraria.
1. Satuan	:	1. 1 dokumen data sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi; 2. 1 dokumen data permasalahan penataan aset reforma agraria.
2. Lokasi	:	1. Data sengketa, konflik dan perkara pertanahan di 35 Kabupaten/Kota; 2. Data permasalahan penataan aset reforma agraria di 35 Kabupaten/Kota
D. **Latar belakang**	:	Seiring dengan berkembangnya masyarakat, tanah menjadi salah satu kebutuhan pokok, karena kebutuhan akan tanah tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, kebutuhan tempat tinggal maupun suatu kegiatan usaha, disebabkan oleh alasan tersebut tanah menjadi objek yang sangat rawan menimbulkan permasalahan atau sengketa. Permasalahan atau sengketa pertanahan tersebut di atas biasanya terjadi menyangkut masalah penguasaan dan kepemilikan. Kondisi tersebut dapat

Dipindai dengan CamScanner

menyebabkan ketimpangan pada pemanfaatan yang diikuti perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang mempunyai akses.

Pada wilayah Provinsi Jawa Tengah sendiri saat ini masih terdapat konflik penguasaan pertanahan yang melibatkan antara:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
2. Pemerintah Kabupaten Kota
3. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan masyarakat;
4. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Instansi pusat;
5. Instansi pusat dengan masyarakat;
6. Masyarakat dengan masyarakat.

Karena adanya konflik pertanahan yang terjadi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka melaksanakan salah satu kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Urusan Pertanahan khususnya kegiatan Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi perlu dilaksanakan inventarisasi permasalahan pertanahan di 35 Kabupaten/Kota sebagai dasar penyusunan *database* yang kemudian akan digunakan untuk penentuan prioritas pelaksanaan fasilitasi permasalahan dimaksud.

Untuk itulah, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah melakukan Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi untuk mendukung dan mengimplementasikan sebagian dari tugas pokok dan fungsi Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah yang dalamnya mengakomodir kegiatan Penanganan Permasalahan Pertanahan di Daerah

E. Lingkup kegiatan : A. **Penjelasan :**

Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

a. **Maksud :**

1) Menginventarisir permasalahan pertanahan berada di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota maupun dalam wilayah Kabupaten/Kota;
2) Mengidentifikasi subyek dan obyek permasalahan pertanahan.

Dipindai dengan CamScanner

b. **Tujuan :**

1) Tersusunya dokumen permasalahan pertanahan di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang bersifat lintas Kabupaten/Kota maupun dalam wilayah Kabupaten Kota;
2) Untuk mengklasifikasikan data permasalahan pertanahan di Kabupaten/Kota dan untuk menentukan prioritas permasalahan pertanahan yang harus difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

B. **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan**

Mekanisme/metode pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan secara Swakelola.

C. **Kebutuhan Waktu Sub Kegiatan**.

Kebutuhan waktu Sub Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

D. **Yang Terlibat Dalam Sub Kegiatan.**

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan :

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
5. Instansi Pusat.

F. **Komponen kegiatan**

- **Kebutuhan Operasional Kegiatan**

1. Kebutuhan belanja pegawai	:	a. Kebutuhan Pegawai Tenaga Keamanan/ Pengemudi/Tenaga Teknis dalam kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 2 orang (S1) x 12 bulan x Rp. 4.021.000,- = Rp 96.504.000,-
		b. Kebutuhan Honorarium Sosialisasi Sertifikasi Hak Atas Tanah pada objek Lahan Pertanian Pangan Berkelenjutan (LP2B) 2 orang x 3 kegiatan x Rp. 900.000,- = Rp. 5.400.000,-

Dipindai dengan CamScanner

		c. Kebutuhan Honor Pendampingan Progres Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B Tingkat Kabupaten 1 orang x 3 Kab x 3 bulan x Rp 500.000,- = Rp. 4.500.000,- d. Kebutuhan Honor Pendampingan Progres Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B Tingkat Desa 2 orang x 3 Kab x 3 bulan x Rp. 500.000,- = Rp 9.000.000,- e. Kebutuhan Waktu : 1 (satu) Tahun Anggaran
2. Dukungan Tenaga Ahli/Pakar	:	Sub Kegiatan Inventarisasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi agar berjalan lancar dan tepat waktu diperlukan narasumber pada Rapat Koordinasi Permasalahan Pertanahan. Keterlibatan/mekanisme serta output membantu menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kebutuhan jumlah/waktu/periode : Satu (1) Tahun Anggaran 2025.
3. Koordinasi		a. **Rencana Koordinasi & rapat yang diperlukan dalam kegiatan :** 1) Rapat Koordinasi Inventarisasi Permasalahan Pertanah Lintas Kab/Kota = 9 kegiatan; 2) Rapat Progres Sertifikasi Hak Atas Tanah LP2B = 4 kegiatan b. **Pihak yang terlibat dalam Koordinasi :** 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; 2) OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan; 3) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; 4) Camat dan Pemerintah Desa lokasi Sertifikasi Hak Atas Tanah dan Sertifikasi Tanah Kas Desa. c. **Frekuensi Kebutuhan dan Waktu** : 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.
4. Tinjauan Lapang		a. Rencana tinjauan lapangan pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka untuk : 1) Berkoordinasi terkait dengan data permasalahan pertanahan; 2) Berkoordinasi terkait dengan data permasalahan penataan aset reforma agraria. b. Pihak yang terlibat dalam koordinasi : 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; 2) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3) OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan; 4) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; c. Frekuensi Kebutuhan dan Waktu :

Dipindai dengan CamScanner

	1 (satu) Tahun Anggaran 2025.		
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-	
G. **Anggaran**	:	*Th 2024*	*: Rp. 250.000.000,-*
		Th 2025	*: Rp. 330.000.000,-*
		Th 2026	*: Rp. 363.000.000,-*
H. **Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)**			
I. **Penutup**	:	Kerangka Ajuan Kerja (KAK) ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sub Inventarisasi Sengketa, Konflik Dan Perkara Pertanahan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Hal-hal yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, akan dikembangkan sesuai kebutuhan namun tetap mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

ILHAM PRIBADI, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19841201 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) USULAN
SUB KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI TAHUN 2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
Dinas/ Balai/ Cabang Dinas	:	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah.
Program	:	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.
A. **Kegiatan**	:	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Sub kegiatan	:	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
Dukungan terhadap indikator Program	:	Presentase penyelesaian permasalahan pertanahan.
B. **Sasaran kegiatan**	:	Terlaksananya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan reforma agrarian.
C. **Output kegiatan**		
1. Satuan	:	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sejumlah 10 Berita Acara.
2. Lokasi	:	Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Tanah Garapan di 35 Kabupaten/ Kota.
D. **Latar belakang**	:	Sebagai sumber agraria yang paling penting, tanah merupakan sumber produksi yang sangat dibutuhkan sehingga ada banyak kepentingan yang membutuhkannya. Perkembangan penduduk dan kebutuhan yang menyertainya semakin tidak sebanding dengan luasan tanah yang tidak pernah bertambah. Karena itulah, tanah dan segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya selalu menjadi "ajang perebutan" berbagai kepentingan dan yang menjadikan bahwa tanah selalu menjadi obyek yang diperebutkan sehingga memunculkan adanya sengketa dan konflik yang berkaitan dengan tanah dan sumber daya yang dikandungnya.

Dipindai dengan CamScanner

		Mencermati permasalahan pertanahan yang semakin kompleks dan meningkat secara kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan penanganan secara serius dan sistematis. Secara umum, penyelesaian masalah pertanahan dapat diselesaikan melalu jalur non-litigasi dan litigasi. Melalui jalur litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan, sedangkan melalui jalur non-litigasi dapat ditempuh dengan perundingan, konsiliasi, dan mediasi. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan Reforma Agraria yang merupakan Proyek Strategis Nasional sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, sebelumnya Bidang Pertanahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melaksanakan Konsolidasi Tanah untuk mengatasi permasalahan yang terkait penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menyelesaikan konflik pertanahan. Selanjutnya, melihat banyaknya masyarakat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang masih kurang pemahaman terkait dengan hukum pertanahan maka pada Tahun Anggaran 2025 dukungan pelaksanaan reforma agraria akan dilaksanakan pada bidang penataan akses melalui sosialisasi peningkatan kesadaran hukum pertanahan, sosialisasi permasalahan tanah kas desa di wilayah perbatasan.
E. **Lingkup kegiatan**	:	A. **Penjelasan :** **Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.** a. **Maksud :** 1) Memberikan solusi alternatif penyelesaian permasalahan di Daerah yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah; 2) Meminimalisir konflik pertanahan yang memerlukan penanganan masing-masing pihak baik itu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan; 3) Memberikan edukasi yang mendidik kepada masyarakat dan Pemerintah Desa sehingga dapat meningkatkan kesadaran hukum pertanahan. 4) Menata kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai rencana tata ruang, sekaligus menyediakan tanah untuk pembangunan, untuk menjaga

Dipindai dengan CamScanner

kelestarian lingkungan hidup dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat.

b. **Tujuan :**

1) Membantu Pemerintah Daerah dan memfasilitasi permasalahan-permasalahan bidang pertanahan sesuai kewenangan Pemerintah Provinsi;
2) Penanganan secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan suatu pendekatan dan cara yang manusiawi dan berkeadilan guna penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka penyediaan tanah untuk pembangunan nasional;
3) Terlaksananya mediasi penanganan permasalahan pertanahan;
4) Mewujudkan tatanan penguasaan pemilikan dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur disertai kepastian hukum.

B. **Mekanisme/Metode Pelaksanaan Sub Kegiatan**

Mekanisme/metode pelaksanaan kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan secara Swakelola.

C. **Kebutuhan Waktu Sub Kegiatan.**

Kebutuhan waktu Sub Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.

D. **Yang Terlibat Dalam Sub Kegiatan.**

Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dilaksanakan dengan berkoordinasi, berkonsultasi dan bekerjasama dengan :

1. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;
2. OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
3. OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan;
4. Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota;
5. Instansi Pusat;
6. Penyediasa Jasa Perencanaan Konsolidasi Tanah

F. **Komponen kegiatan**

Dipindai dengan CamScanner

• **Kebutuhan Operasional Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	a. Kebutuhan Honorarium Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah Rp 31.250.000,- b. Kebutuhan Penyedia Jasa Perencanaan Konsolidasi Tanah Rp 50.000.000,- c. Kebutuhan Honorarium Narasumber Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Hukum Pertanahan Rp. 8.100.000,- d. Kebutuhan Waktu : 1 (satu) Tahun Anggaran
2. Dukungan Tenaga Ahli/Pakar	:	Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi agar berjalan lancar dan tepat waktu diperlukan: 1. Tim Koordinasi Konsolidasi Tanah 2. Konsultan Penyedia Jasa Perencana Konsolidasi Tanah Keterlibatan/mekanisme serta output membantu menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan Sub Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Kebutuhan jumlah/waktu/periode : Satu (1) Tahun Anggaran 2025.
3. Koordinasi		a. **Rencana Koordinasi & rapat yang diperlukan dalam kegiatan :** 1) Sosialisasi peningkatan kesadaran hukum pertanahan = 3 kegiatan; 2) Rapat fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan = 20 kegiatan; b. **Pihak yang terlibat dalam Koordinasi :** 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah; 2) OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan; 3) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; c. **Frekuensi Kebutuhan dan Waktu** : 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.
4. Tinjauan Lapang		a. Rencana tinjauan lapangan pada tahun anggaran 2025 dilaksanakan dalam rangka untuk : 1) Koordinasi persiapan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum pertanahan; 2) Pelaksanaan sosialisasi peningkatan kesadaran hukum pertanahan; 3) Koordinasi fasilitasi permasalahan pertanahan; 4) Konsultasi ke Pusat; 5) Koordinasi permasalahan pertanahan di wilayah perbatasan Provinsi. b. Pihak yang terlibat dalam koordinasi : 1) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

		2) OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; 3) OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanahan; 4) Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota; c. Frekuensi Kebutuhan dan Waktu : 1 (satu) Tahun Anggaran 2025.	
• **Kebutuhan Belanja Modal**			
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-	
G. **Anggaran**	:	*Th 2024* *Th 2025* *Th 2026*	*: Rp. 350.000.000,-* *: Rp. 240.000.000,-* *: Rp. 653.000.000,-*
H. **Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)**			
I. **Penutup**	:	Kerangka Ajuan Kerja (KAK) ini sebagai acuan dalam penyelenggaraan Sub Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi. Hal-hal yang belum tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, akan dikembangkan sesuai kebutuhan namun tetap mengacu pada tujuan yang sudah ditetapkan.	

Semarang, 2 Januari 2025

Diketahui Oleh :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

ILHAM PRIBADI, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19841201 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN KOORDINASI PENETAPAN REDISTRIBUSI TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
Bidang/ Seksi	:	Dinas
Program	:	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Kegiatan	:	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
B. Sasaran Sub kegiatan	:	1. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang pertanahan di Provinsi Jawa Tengah; 2. Terlaksananya Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sesuai dengan penetapan lokasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah; 3. Melaksanakan tupoksi dalam hal pembinaan dan pengendalian urusan pertanahan;
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1. Pengendalian masa berlaku Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum yang ditetapkan oleh Gubernur, jumlah bidang yang dilakukan pemantauan sejumlah 5 dokumen; 2. Pengendalian Penanganan Permasalahan Pertanahan 5 dokumen; 3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria 5 dokumen; 4. Pembinaan dan Pengendalian Urusan Pertanahan 5 dokumen 5. Penyelenggaraan Reforma Agraria/Rakor Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan, sejumlah 2x kegiatan; 6. Konsultasi/Koordinasi/Penyamaan Persepsi Urusan Pertanahan, sejumlah 1x kegiatan.
2. Lokasi	:	Pembinaan dan Pegendalian Pertanahan 5 Lokasi, Pemantauan Penlok 5 Lokasi, Pengendalian Penanganan Permasalahan Pertanahan 5 Lokasi, Monev RA 5 Lokasi,Koordinasi Pelaksanaan RA 5 Lokasi
D. Latar belakang	:	1. Pemantauan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui perkembangan/progress pelaksanaan keputusan Gubernur dimaksud; 2. Pemantauan sertifikasi hak atas tanah dilaksanakan untuk menegaskan status hak atas tanah;

Dipindai dengan CamScanner

		3. Sosialisasi/Rakor Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan dan Konsultasi/Koordinasi/Penyamaan Persepsi Urusan Pertanahan dilaksanakan sebagai upaya terciptanya pemahaman yang sama antar pemangku kebijakan. 4. Konsultasi/Koordinasi/Penyamaan Persepsi Urusan Pertanahan dilaksanakan sebagai upaya terciptanya pemahaman yang sama antar pemangku kebijakan.
E. Lingkup kegiatan	:	1.Terpantaunya kendala/hambatan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang penetapan lokasinya ditetapkan oleh Gubernur dengan prioritas penetapan lokasi yang akan berakhir masa berlakunya; 2.Terlaksananya Tupoksi dalam hal Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan 3.Terciptanya sinergi langkah antara Kementerian ATR/BPN, Pemerintah Provinsi, Kanwil BPN, Pemerintah Kab/Kota, Kantor Pertanahan Kab/Kota dan Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	–
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Kebutuhan Narasumber Rakor/Sosialisasi Urusan Pertanahan : Pejabat Eselon III/IV dari Instansi, Provinsi,Kab/Kota/Praktisi – Kebutuhan Moderator Rakor/Sosialisasi Urusan Pertanahan : Pejabat Eselon III/IV dari Instansi/Provinsi
3. Koordinasi	:	a. Kanwil BPN dan Instansi terkait dalam rangka pelaksanaan Sosialisasi/Rakor Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan; b. Kementerian yang membidangi Urusan Pertanahan. c. Instansi yang memerlukan tanah dalam rangka pemantauan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum d. Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka pemantauan sertifikasi hak atas tanah
4. Tinjauan lapang	:	1. Bidang tanah Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. 2. Bidang tanah obyek serfikasi hak atas tanah
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	--
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	--
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2025 : Rp. 130.000.000,-* *Th 2026 : Rp. 180.000.000,-* *Th 2027 : Rp. 230.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	Kerangka Acuan Kerja dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk dapat dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Semarang, 02 Januari 2025

Diketahui Oleh :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN

ILHAM PRIBADI, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19841201 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Sosialisasi/Rapat Koordinasi Bidang Pertanahan												
2	Kegiatan Pemantauan Penetapan Lokasi (Penlok)												
3	Pengendalian Penanganan Permasalahan Pertanahan												
4	Pembinaan dan Pengendalian Pertanahan												
5	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reforma Agraria												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENATAAN AKSES DALAM PEMANFAATAN REDISTRIBUSI TANAH TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	:	**Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar**
Bidang/ Seksi	:	Dinas
Program	:	Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Kegiatan	:	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
A. Sub Kegiatan	:	
Dukungan terhadap indikator Program	:	Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
Dukungan terhadap indikator Kegiatan		Prosentase Meningkatnya Tertib Administrasi Pertanahan
B. Sasaran Sub kegiatan	:	1. Masyarakat penerima manfaat melalui Penataan Akses Reforma Agraria; 2. Kanwil BPN, Pemerintah Kab/Kota, Kantor Pertanahan Kab/Kota dan Instansi terkait.
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1. Penataan Akses Reforma Agraria, 5 Lokasi; 2. Penataan Akses Reforma Agraria melalui Desa Rintisan Reforma Agraria 2 Lokasi
2. Lokasi	:	5 Lokasi Penataan Akses Reforma Agraria, 2 Lokasi Desa Rintisan Reforma Agraria
D. Latar belakang	:	1. Penataan Akses Reforma Agraria a) Penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset disertai dengan Penataan Akses; b) Penataan akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subyek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. 2. Penataan Akses Reforma Agraria melalui Desa Rintisan Reforma Agraria guna optimalisasi peran Provinsi sekaligus sebagai pilot project penataan akses Reforma Agraria
E. Lingkup kegiatan	:	1. Penataan Akses Reforma Agraria Pelaksanaan pengembangan penataan akses dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu tahap **persiapan, peninjauan lapang dan penyusunan** rencana pengembangan penataan akses. Pada tahapan persiapan dilakukan penyiapan data berupa subyek dan obyek redistribusi tanah/legalisasi aset serta program-program pemberdayaan yang ada pada instansi terkait, pada tahapan peninjauan lapang dilakukan pencarian potensi pengembangan penataan **akses** di lokasi redistribusi tanah/legalisasi aset yang belum mendapatkan penataan

Dipindai dengan CamScanner

		akses, dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, ketertarikan dan kebutuhan masyarakat. Potensi pasar serta sosial budaya masyarakat, sedangkan tahapan penyusunan rencana pengembangan penataan akses dilaksanakan berdasarkan hasil peninjauan lapang atas potensi pengembangan penataan akses yang didapatkan dan ketersediaan program/kegiatan serta anggaran pemberdayaan masyarakat; 2. Penataan Akses Reforma Agraria melalui Desa Rintisan Reforma Agraria agar penerima manfaat dapat pendampingan yang berkalanjutan terkait meningkatkan fungsi lahan dan perekonomian masyarakat
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	: –	
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	: –	Kebutuhan Narasumber Penataan Akses Reforma Agraria : (Pejabat Eselon III/IV Instansi Provinsi/Kab/Kota/Praktisi); – Kebutuan Narasumber Desa Rintisan Reforma Agraria : (Pejabat Eselon III/IV Instansi Provinsi/Kab/Kota/Praktisi); – Kebutuhan Moderator Rakor/Sosialisasi Urusan Pertanahan : (Pejabat Eselon III/IV Instansi Provinsi/Kab/Kota).
3. Koordinasi	: a.	Pemerintah Kab/Kota, Kantor Pertanahan Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Instansi terkait dalam rangka penataan akses reforma agraria; b. Pemerintah Kab/Kota dan Pemerintah Desa, dalam rangka Penataan Akses Desa Rintisan reforma Agraria. c. Praktisi
4. Tinjauan lapang	:	– Obyek Desa Rintisan Reforma Agraria; – Obyek Penataan Akses Reforma Agraria.
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	*Th 2025 : Rp. 395.000.000,-* *Th 2026 : Rp. 445.000.000,-* *Th 2027 : Rp. 495.000.000,-*
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	Kerangka Acuan Kerja dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan sehingga perencanaan yang telah dituangkan dalam Kerangka Acuan Kerja untuk dapat dilaksanakan sesuai tahapan-tahapan yang telah ditetapkan.

Semarang, 02 Januari 2025

Diketahui Oleh :
KEPALA BIDANG PERTANAHAN



ILHAM PRIBADI, SH, MH
Penata Tingkat I
NIP. 19841201 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2025

NO	SUB-SUB KEGIATAN	BULAN											
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES
1	Penataan Akses Reforma Agraria												
2	Desa Rintisan Reforma Agraria												

Dipindai dengan CamScanner

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN
BIDANG PKP DAN PERTANAHAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok A.
A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang	:	Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub Kegiatan	:	Penyusunan/ Review/ Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Pertanahan
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia
B. Sasaran Sub kegiatan	:	1. Terfasilitasinya penyusunan kebijakan bidang PKP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota; 2. Terlaksananya review kebijakan bidang PKP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota.
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1 (satu) Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/ Tereview/ Terlegalisasi
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfataan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi. 2. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang

		menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui monitoring, evaluasi, dan supervise terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. 3. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, yang mengatur terkait Pokja dan Forum PKP sebagai panduan perwujudan peran masyarakat dalam tata cara pemberikan masukan oleh masyarakat pada setuap tahapan penyelenggaraan PKP, serta sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PKP. Melalui tugas dan fungsinya, diperlukan mekanisme kerja dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara multisector, serta mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program baik antar *stakeholders* di tingkat pusat maupun daerah yang diperlukan pada seluruh rantai pasok penyediaan perumahan, termasuk masalah pertanahan dan strategi pembiayaan. 4. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 yang mengamanatkan perwujudan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendorong keterlibatan peran dan sinergitas antar *stakeholder* di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan melalui Pokja dan Forum PKP sebagai regulator dan fasilitator pelayanan masyarakat. 5. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders.* Hal ini didasarkan pada besarnya sumber daya yang harus dikelola, banyaknya permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang harus segera diatasi, serta kebutuhan rumah layak huni dan kawasan permukiman berkualitas yang harus segera dicukupi.
E. Lingkup kegiatan	:	1. Fasilitasi Penyusunan Kebijakan Bidang PKP a. Persiapan Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pembangunan Daerah terkait dengan penyiapan kebijakan dan strategi untuk penyusunan RPJMD dan Renstra PD; b. Koordinasi penyusunan kebijakan dan strategi di bidang PKP dan Pertanahan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota melalui rapat koordinasi dan *Focus Group Disscussion* (FGD); 2. Review Kebijakan Bidang PKP a. Review kebijakan bidang PKP baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Tim Teknis – Tim Pelaksana Kegiatan – Tim Administrasi – Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan sebagai berikut : • S1 Hukum (1 orang)

		– Tenaga Ahli Planologi/ Perencanaan Wilayah dan Kota (1 orang) – Kelompok Kerja dan Forum PKP
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Narasumber dan Moderator (FGD Kebijakan-Strategi PKP dan Pertanahan) dari unsur sebagai berikut : • Pemerintah Pusat (Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/ BPN dan/atau Kementerian Dalam Negeri); • Pemerintah Provinsi (OPD terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); • Pemerintah Kabupaten/ Kota (OPD terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); • Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.
3. Koordinasi	:	– Rapat Koordinasi – Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP Kabupaten/ Kota, atau instansi terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan) – Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/ BPN dan/atau Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian terkait lainnya)
4. Tinjauan lapangan	:	– Penyusunan/Review Kebijakan bidang PKP di Kabupaten/ Kota – Pembinaan dan pengawasan RP3KP
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2025 : Rp 310.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP dan Pertanahan, sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Keterpaduan
Perumahan dan Kawasan Permukiman

ARIF SUGENG HARYANTO, ST
NIP. 19731120 200501 1 006

KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENERBITAN SERTIFIKASI DAN REGISTRASI PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN KUALIFIKASI MENENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok A.
A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman/ Seksi Keterpaduan Infrastruktur
Program	:	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah
A. Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	Jumlah Dokumen Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dan Pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
B. Sasaran Sub kegiatan	:	Tersetifikasi dan Teregristrasinya Pengembang Perumahan Provinsi Jawa Tengah Tingkat Menengah
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	1 (satu) Dokumen Pembinaan PKP dan Sertifikasi Regristrasi Pengembang Perumahan
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. *UU No.23 Tahun 2014* tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa salah satu sub urusan pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi adalah sub urusan sertifikasi, kualifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah. 2. *Pergub Prov. Jateng No.61 Tahun 2016* tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PERAKIM dimana salah satu tugas dari Bidang Keterpaduan PKP adalah fasilitasi sertifikasi dan regristrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana sarana utilitas umum tingkat kemampuan menengah 3. *Permen PUPR No.24/PRT/M/2018,* tentang Akreditasi Dan Registrasi Asosiasi Pengembang Perumahan Serta Sertifikasi Dan Registrasi Pengembang Perumahan 4. *Permendagri No.90 Tahun 2019*, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah pada urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan

		Kawasan Permukiman, salah satu programnya adalah Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
E. Lingkup kegiatan	:	1. Koordinasi dengan Kementerian PUPR, Asosiasi Pengembang Perumahan, OPD PERAKIM di 35 Kabupaten/Kota, dan instansi terkait lainnya; 2. Identifikasi Pengembang Perumahan di Provinsi Jawa Tengah tingkat Menengah a. Profiling pengembang perumahan tingkat menengah di Provinsi Jawa Tengah dengan berkoordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, asosiasi pengembang perumahan, dan melakukan kunjungan lapangan b. Penetapan pengembang perumahan tingkat menengah 3. Kegiatan Sertifikasi Regristrasi Pengembang Perumahan Provinsi Jawa Tengah a. Koordinasi Tim Sertifkasi Regristrasi Pengembang Perumahan (SRPP) Provinsi Jawa Tengah terkait proses kegiatan SRPP b. Kunjungan lapangan Tim SRPP untuk proses verifikasi pengembang perumahan c. Penerbitan Sertifikat kepada pengembang perumahan tingkat menengah melalui penetapan oleh Tim SRPP Provinsi Jawa Tengah 4. Kegiatan Pembinaan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman a. Pembinaan kepada 35 Kabupaten/Kota pada lingkup kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman b. Pemberian Hibah Peralatan Percetakan Paving pada POKMAS/UMKM/BUMDES c. Pembinaan POKMAS/UMKM/BUMDES terkait kegiatan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Tim Teknis – Tim Pelaksana Kegiatan – Tim Sekretariat – Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan - S1 Planologi/ T. Sipil/ T. Arsitektur (1 orang)
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	– Narasumber dan Moderator - Rapat Koordinasi Kegiatan Sertifikasi dan Regristrasi Pengembang Perumahan (Kementerian PUPR, Provinsi, Asosiasi Pengembang) - Pembinaan Lingkup Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PUPR, Provinsi, Akademisi, Aplikator)
3. Koordinasi	:	– Rapat Koordinasi – Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP Kabupaten/ Kota, Asosiasi Pengembang, POKMAS/UKMK/BUMDES, Pengembang Perumahan, atau instansi terkait) – Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kemendagri, Kemen PUPR, atau instansi terkait)
4. Tinjauan lapangan	:	– Pelaksanaan kegiatan SRPP – Verifikasi lapangan ke pengembang perumahan – Pembinaan ke kabupaten/kota – Pelatihan POKMAS/UMKM/BUMDES
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	-
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	-

G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2025	: Rp 200.000.000,-
Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)			
H. Penutup	:	Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah, sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.	

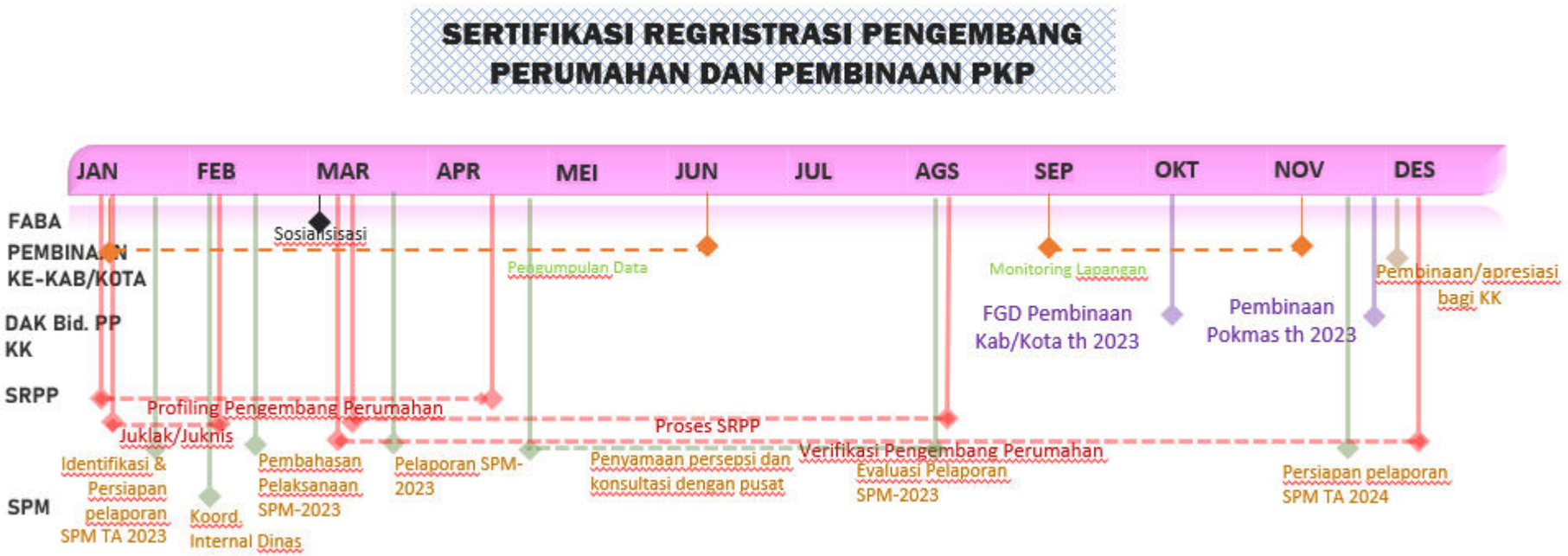
Semarang, 2 Januari 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Keterpaduan
Perumahan dan Kawasan Permukiman



ARIF SUGENG HARYANTO, ST
NIP. 19731120 200501 1 006

JADWAL PELAKSANAAN SUB KEGIATAN TA. 2024



KAK USULAN RENCANA SUB KEGIATAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN
URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jalan Madukoro Blok A.
A-BB Komplek PRPP Semarang Kode Pos 50144 Telepon 024 - 7600247
PABX 7608533, 7603586, 7608581 Faksimile 024 – 7608202, 7608434
Laman http://jatengprov.go.id Surat Elektronik disperakim@jatengprov.go.id

URUSAN PEMERINTAHAN	**:**	**WAJIB PELAYANAN DASAR**
Bidang/ Seksi	:	Bidang Keterpaduan Perumahan Dan Kawasan Permukiman
Program	:	Program Kawasan Permukiman
Kegiatan	:	Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
A. Sub Kegiatan	:	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Dukungan terhadap indikator Program	:	Persentase ketersediaan kebijakan strategi, data, dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman
Dukungan terhadap indikator Kegiatan	:	• Jumlah dokumen evaluasi kinerja Bidang PKP yang tersedia • Jumlah dokumen kebijakan dan strategi Bidang PKP yang tersedia • Jumlah dokumen pengelolaan data dan publikasi Bidang PKP yang tersedia
B. Sasaran Sub kegiatan	:	1. Terfasilitasinya Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah; 2. Terfasilitasinya implementasi dan pengembangan kemitraan bidang PKP dan Pertanahan; 3. Terfasilitasinya Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; 4. Tersedianya basis data bidang perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Jawa Tengah yang terintegrasi dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota serta Pemerintah Pusat guna penentuan kebijakan dan perencanaan PKPP.
C. Output Sub kegiatan		
1. Satuan	:	– 1 (satu) Laporan Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman; – 1 (satu) Laporan Evaluasi bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; – 1 (satu) Laporan Pengelolaan Data Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; – 1 (satu) Laporan Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi.
2. Lokasi	:	Provinsi Jawa Tengah
D. Latar belakang	:	1. UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyebutkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfataan, dan pengendalian termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat yang terkoordinasi

dan terpadu. Pemerintah Provinsi memiliki wewenang melakukan pembinaan dalam bentuk koordinasi, sinkronisasi, dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dengan menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman di tingkat Provinsi.

2. Peraturan Pemerintah RI No. 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. PP tersebut menyebutkan bahwa dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota, Presiden dibantu oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pembinaan dan pengawasan diantaranya melalui monitoring, evaluasi, dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya.
3. Permen PUPR Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan permukiman, yang mengatur terkait Pokja dan Forum PKP sebagai panduan perwujudan peran masyarakat dalam tata cara pemberikan masukan oleh masyarakat pada setiap tahapan penyelenggaraan PKP, serta sebagai wadah koordinasi dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan PKP. Melalui tugas dan fungsinya, diperlukan mekanisme kerja dalam rangka mengelola kompleksitas pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman secara multisektor, serta mewujudkan keterpaduan kebijakan dan program baik antar *stakeholders* di tingkat pusat maupun daerah yang diperlukan pada seluruh rantai pasok penyediaan perumahan, termasuk masalah pertanahan dan strategi pembiayaan.
4. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang RP3KP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2039 yang mengamanatkan perwujudan rumah layak huni dan kawasan permukiman yang berkualitas, terjaminnya ketersediaan tanah untuk pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman, serta mendorong keterlibatan peran dan sinergitas antar *stakeholders* di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan melalui Pokja dan Forum PKP sebagai regulator dan fasilitator pelayanan masyarakat.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 tahun 2016 tentang *Single Data System* untuk Pembangunan Daerah di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, melalui pengelolaan data pembangunan daerah yang akurat, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, mudah diakses dan berkelanjutan.
6. Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan kolaborasi dengan melibatkan seluruh *stakeholders.* Hal ini didasarkan pada besarnya sumber daya yang harus dikelola, banyaknya permasalahan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang harus segera diatasi, serta kebutuhan rumah layak huni dan kawasan permukiman berkualitas yang harus segera dicukupi.

E. Lingkup kegiatan	:	1. Fasilitasi Pokja dan Forum PKP Provinsi Jawa Tengah, serta Implementasi dan Pengembangan Kemitraan Bidang PKP dan Pertanahan a. Fasilitasi Pokja/ Forum PKP dan Pengembangan Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang terdiri dari Rakor Pokja PKP yang dilaksanakan tiap triwulan dan Rakor Forum PKP yang dilaksanakan tiap semester, serta Rakor Pokja dan Forum PKP Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Tengah; b. Fasilitasi Pelaksanaan KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan yang meliputi kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan KKN Tematik dengan Perguruan Tinggi dan *stakeholders* mitra terkait serta pelaksanaan kegiatan Monitoring KKN Tematik di lokasi KKN; c. Sosialisasi KKN Tematik Kemitraan di Lingkup Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan antara lain Sosialisasi Rumah Layak Huni dan Lingkungan Permukiman Sehat di lokasi KKN; d. Pengembangan Kemitraan Multi *Stakeholders* di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan melalui Rapat Pembahasan Kemitraan, Koordinasi Pelaksanaan Kemitraan, Forum Kemitraan dan *Talkshow Overview* Kemitraan Lingkup Bidang PKP dan Pertanahan. 2. Evaluasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman a. Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di setiap triwulan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah b. Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam rangka pemberian penghargaan kepada Kabupaten/Kota c. Kegiatan Penilaian Kabupaten/Kota pada Rangkaian Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) d. Monitoring kegiatan lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Jawa Tengah e. Verifikasi atas Fasilitasi Pemanfaatan FABA PLTU 3. Pengelolaan Data Perumahan dan Kawasan Permukiman a. Sinkronisasi dan Konsolidasi Data Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Rapat Konsolidasi Data PKP Provinsi Jawa Tengah, Desk Data PKP Provinsi Jawa Tengah, Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah, dan Rapat Pendataan PKP. b. Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi melalui Rapat Fasilitasi Penyampaian Informasi dan Publikasi.
F. Komponen kegiatan		
• **Kebutuhan Operasional Sub Kegiatan**		
1. Kebutuhan belanja pegawai	:	– Tim Teknis – Tim Pelaksana Kegiatan – Tim Administrasi – Tenaga Teknis Pendukung Kegiatan • S1 Planologi/ T. Sipil/ T. Arsitektur (3 orang) • S1 Teknik Informatika/ Sistem Komputer (1 orang) • SMA (1 orang) – Kelompok Kerja dan Forum PKP
2. Dukungan Tenaga Ahli/ Pakar	:	Narasumber dan Moderator – Rapat Koordinasi Pokja dan Forum PKP se-Provinsi Jawa Tengah, dengan unsur sebagai berikut :

		• Pokja PKP Nasional (Kementerian PPN/ Bappenas); • Unsur Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan/atau Kementerian Dalam Negeri); • Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah (OPD terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman); • Pokja PKP Kabupaten/Kota (OPD terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman); • Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan terkait sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman. – Rapat Koordinasi Forum Kemitraan • TKKSD Provinsi Jawa Tengah; • Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; • Mitra kerjasama Disperakim Prov. Jateng. – Talkshow Overview Kemitraan Lingkup Bidang PKP dan Pertanahan • TKKSD Provinsi Jawa Tengah; • Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; • Mitra kerjasama Disperakim Prov. Jateng. – Pelaksanaan Peringatan Hari Perumahan Nasional (HAPERNAS) – Pelaksanaan Pemberian Penghargaan kepada Kabupaten/Kota – Forum Data PKP Provinsi Jawa Tengah • Unsur Pemerintah Pusat (Kementerian PUPR dan/atau Kementerian terkait Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); • Unsur Pemerintah Provinsi (OPD terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); • Unsur Pemerintah Kabupaten/ Kota (OPD terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan); • Akademisi/ Praktisi/ Asosiasi/ Lembaga Kemasyarakatan terkait sektor Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
3. Koordinasi	:	– Rapat Koordinasi – Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Bappeda, Dinas PKP Kabupaten/ Kota, Perangkat Desa, atau instansi terkait) – Perjalanan Dinas Luar Daerah (Kemendagri, Kemen PUPR, atau Kementerian terkait)
4. Tinjauan lapangan	:	– Pelaksanaan kemitraan – Pendayagunaan rekayasa teknologi – Pembinaan Pokja dan Forum PKP Kabupaten/ Kota – Monitoring dan Evaluasi lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman – Pendataan Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan
• **Kebutuhan Belanja Modal**		
1. Kebutuhan/ dukungan alat/ bahan/ barang	:	
2. Pengadaan tanah/ lahan	:	
G. Anggaran Sub Kegiatan	:	Th 2025 : Rp 650.000.000,-

Rincian Kegiatan dan Tahapan Pelaksanaan (format terlampir)		
H. Penutup	:	Demikian KAK ini dibuat sebagai acuan/ pedoman melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman, sehingga dapat dilaksanakan sesuai perencanaan.

Semarang, 2 Januari 2025
Kepala Bidang Keterpaduan
Perumahan dan Kawasan Permukiman



ARIF SUGENG HARYANTO, ST
NIP. 19731120 200501 1 006